

SINERGI

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 29/Mei 2018



Ikuti
Kuis BPIW
di hal.57

Wujudkan Kesiambungan Perencanaan Infrastruktur
Sektor PUPR Melalui Renstra Teknokratik



BPIW • Kementerian PUPR

Pembangunan Infrastruktur Didorong untuk Mengontrol Kunjungan Wisatawan



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804



Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat, kami mewakili Pimpinan dan segenap pegawai BPIW mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Buletin Sinergi sudah memasuki edisi ke-29, Mei 2018. Banyak informasi yang kami hadirkan pada edisi kali ini.

Untuk Kabar Utama dibahas mengenai penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024, saat ini BPIW sedang menyiapkan Renstra Teknokratik sebagai bagian dari proses penyusunan Renstra PUPR 2020-2024 tersebut.

Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru, menjadi pembahasan pada Laporan Khusus. Dalam rubrik Wawancara menampilkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga yang menyampaikan pengembangan kawasan perkotaan sampai saat ini dan tindak lanjut ke depannya.

Pada rubrik Teknologi ditampilkan produk dari Balitbang Kementerian PUPR berupa Saluran Irigasi Modular. Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-jalan yang membahas beberapa tempat wisata di Provinsi Lampung dan ulasan berita yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media. Kami tampilkan juga dokumentasi kegiatan selama bulan ini dalam rubrik Potret.

Rubrik ringan tetap mewarnai Buletin Sinergi edisi ini seperti Serba-Serbi yang membahas 5 Rusun Terkenal yang dioperasikan pada 2015-2018 dan Tips Mengembalikan Semangat Kerja Setelah Libur Panjang.

Kami berharap Buletin Sinergi selalu memenuhi harapan pembaca dalam memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW

Tim Penyusun:

Pelindung:
Lana Winayanti

Pengarah:
Firman Hatorangan Napitupulu

Penasehat
Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Sucahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:
P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:
Shovichah

Editor :
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Alis Listalatu
Rian Farhan
Fitri Selva

Sekretariat:
Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design : Heri Hito
Infografis & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



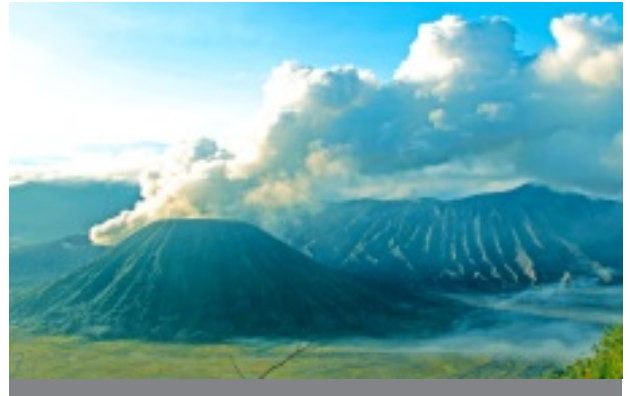
04 Kabar Utama:
Wujudkan Kesenambungan Perencanaan Infrastruktur Sektor PUPR Melalui Renstra Teknokratik



48 Serba Serbi
Inilah 5 Rusun Terkenal yang Dioperasikan pada 2015-2018

Edisi 29 / Mei 2018

daftar isi



10

Wawancara:
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Membutuhkan Perencanaan yang Baik

34

Lapsus:
Pembangunan Infrastruktur Didorong
untuk Mengontrol Kunjungan Wisatawan



52

Teknologi:
Teknologi Saluran Irigasi Modular

54

Potret:
Upacara hari Kebangkitan Nasional

Wujudkan Kesenambungan Perencanaan Infrastruktur Sektor PUPR Melalui Renstra Teknokratik

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, saat ini sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Teknokratik. Renstra tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Renstra Teknokratik yang disusun BPIW tersebut mendukung proyek perubahan dan pengintegrasian pendanaan dalam mewujudkan kesinambungan perencanaan infrastruktur sektor PUPR.



Bendungan Raknamo NTT

Sumber: PUPR

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA K/L



- **Proses teknokratik** dalam penyusunan Renstra adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra. Rancangan Teknokratik Renstra dalam penyusunannya mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN, oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian tujuan RPJMN.
- **Proses politik** dalam penyusunan Renstra merupakan proses penyusunan Renstra yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas Presiden. Proses politik ini merupakan lanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rancangan Renstra.
- **Penetapan Renstra** dilakukan oleh pimpinan Kementerian/Unor/Unit Kerja sesuai entitasnya setelah Rancangan Renstra disesuaikan dengan dokumen perencanaan entitas di atasnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III akan berakhir pada tahun 2019 mendatang. Dalam hal ini berarti Pemerintah RI dalam waktu dekat akan segera memulai RPJMN IV Tahun 2020-2024, yang termasuk dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Adapun tujuan dari RPJMN IV ini adalah mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Oleh karenanya, Kementerian/Lembaga diharapkan mampu menangkap isu-isu strategis dalam kurun waktu lima tahun mendatang dan kemudian menuangkannya ke dalam Dokumen Rencana Strategis. Sementara itu, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, mengamanatkan adanya penyusunan Renstra Teknokratik.

Renstra Teknokratik merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Rancangan Teknokratik RPJMN tersebut disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas yang kemudian menjadi acuan dalam menyusun Renstra Teknokratik masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) merupakan salah satu kementerian yang pertama kali menyusun dan melaksanakan Renstra Teknokratik tersebut guna mendukung RPJMN IV Tahun 2020-2024. Renstra Teknokratik yang disusun oleh Kementerian PUPR disusun sejak awal tahun 2018.

"Tahun ini BPIW menyiapkan Renstra Teknokratik sebagai awal untuk menyusun Renstra PUPR 2020-2024 dan target dalam Renstra tidak pernah bisa diubah dan target tersebut harus diupayakan agar tercapai," ujar Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo saat berbicara pada forum diskusi terkait Penyusunan

Renstra Teknokratik merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.



Sumber: BPIW

Pembahasan Renstra Teknokratik

Masukan Renstra Teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024, pada 7 Mei lalu.

Dikatakannya bahwa Kementerian PUPR dapat memiliki Renstra yang mampu mengoptimalkan peran Kementerian tersebut dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Bobby berharap proses penyusunan Renstra dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat sesuai dengan tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Renstra Teknokratik merupakan tahap awal dari alur penyusunan atau persiapan Renstra Kementerian/Lembaga. Setelah melalui proses teknokratik, selanjutnya dilakukan proses politik. Pada proses politik ini, terdapat visi misi Presiden. Kemudian, setelah melalui proses politik, proses selanjutnya adalah penetapan Renstra. Melalui sejumlah proses tersebut diharapkan pada awal pemerintahan yang baru, Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 telah selesai disusun dan siap dipergunakan.

Renstra ini berlandaskan sejumlah dokumen. Pertama, berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Kedua, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangan

Kementerian PUPR. Ketiga, mengacu pada aspirasi masyarakat.

Pembangunan secara teknokratik sektor bagi Kementerian/Lembaga perlu didukung dari pembangunan tata pemerintahan yang baik, dari sisi aparaturnya, kelembagaan, peraturan perundang-undangan/regulasi yang akuntabel dan memadai. Diharapkan pembangunan secara teknokratik juga mampu mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Hal ini tercermin di dalam amanat Reformasi Birokrasi, yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada Pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Presiden itu dinyatakan bahwa "Pelaksanaan operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025 akan dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap lima tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)".

Aturan itu juga mengamanatkan adanya perwujudan tata pemerintahan yang

Renstra Teknokratik merupakan tahap awal dari alur penyusunan atau persiapan Renstra Kementerian/Lembaga. Setelah melalui proses teknokratik, selanjutnya dilakukan proses politik. Pada proses politik ini, terdapat visi misi Presiden.



PLBN Nanga Badau Kalbar

Sumber: PUPR

baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara pada tahun 2025.

Bila dilihat secara holistik, penyusunan Renstra Teknokratik juga turut mendukung proyek perubahan yang gencar disuarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Setidaknya, Renstra Teknokratik mampu untuk mendukung empat area perubahan. Pertama, dalam hal akuntabilitas, adanya Renstra Teknokratik dipercaya mampu meningkatkan sistem manajemen kinerja di Kementerian/Lembaga. Capaian-capaian yang terukur yang tertuang dalam Renstra Teknokratik menjadi basis kinerja suatu Kementerian/Lembaga.

Kedua, dalam hal kelembagaan, Renstra Teknokratik akan meningkatkan ketepatan ukuran, ketepatan fungsi, serta sinergisme antar kelembagaan. Ketiga, dalam hal tata laksana pemerintahan, Renstra Teknokratik akan mampu mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang lebih jelas, efektif, terukur, dan transparan. Kemudian yang keempat, dengan adanya Renstra Teknokratik diharapkan akan meningkatkan monitoring

dan evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga yang berarti pula meningkatnya pelayanan publik.

Pada kesempatan lain, Direktur Transportasi Kementerian PPN/ Bappenas, Ihwanul Hakim, menyampaikan bahwa terjadi kesenjangan (*gap*) pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada tahun 2015-2019. Dikatakannya bahwa ada *gap* sebesar Rp 264 triliun antara alokasi pemerintah dan kebutuhan infrastruktur tahun 2015-2019. Sehubungan dengan hal itu, pihaknya mendorong Kementerian/Lembaga untuk melibatkan peran swasta dalam skema pendanaan infrastuktur pada dokumen Renstra Teknokratik.

Menurutnya terdapat beberapa skema pendanaan infrastruktur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pendanaan infrastuktur dapat melibatkan berbagai pihak yaitu melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Dana Alokasi Khusus (DAK), Rupiah Murni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.

Renstra Teknokratik dipercaya mampu meningkatkan sistem manajemen kinerja di Kementerian/Lembaga. Capaian-capaian yang terukur yang tertuang dalam Renstra Teknokratik menjadi basis kinerja suatu Kementerian/Lembaga.

Keterpaduan Pendanaan Infrastruktur

Contoh: *Highlight* Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sumatera Utara 2018

Keterpaduan dalam pendanaan (Pemerintah, KPBU, PINA, dan Swasta) untuk membangun Infrastruktur

SBSN:

1. Pembangunan KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

KPBU:

2. Pembangunan BRT + LRT Medan

PINA:

3. Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat

SWASTA LAINNYA:

4. Sibisa *Integrated Tourism Resort*
5. Lake Toba Flower Garden



RUPIAH MURNI :

6. Pembangunan 4 lokasi Dermaga di Danau Toba Tahap II

PHLN:

7. Pembangunan Tol Medan Kualanamu

DAK:

8. Jalan Jrs. Porsea -Siregar, Kec. Porsea/Uluan
9. Jalan Jrs. Lbn Julu - Hatinggian, Kec. Lumban Julu

BUMN:

10. Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

Mengenai perencanaan dan penganggaran ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pada pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan bahwa proyek prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, Ihwanul menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Bappenas melakukan integrasi sumber-sumber pendanaan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat 1 RKP tersebut. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kerangka pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

Ihwanul mencontohkan pada pendanaan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara terdapat integrasi dalam pendanaan untuk membangun infrastruktur yang dilakukan

oleh Pemerintah, KPBU, PINA, dan swasta.

Pertama, Pembangunan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung yang pendanaannya bersumber dari SBSN. Kedua, Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) dan *Light Rail Transit* (LRT) Kota Medan yang bersumber dari KPBU.

Ketiga, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat yang dibiayai melalui skema PINA. Keempat, Pembangunan 4 lokasi Dermaga di Danau Toba Tahap II yang didanai dari Rupiah Murni. Kelima, Pembangunan Tol Medan-Kualanamu yang didanai dengan skema PHLN. Keenam, Jalan Jurusan Porsea – Siregar yang didanai dari DAK. Ketujuh, Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang didanai oleh BUMN. Kemudian ada Sibisa *Integrated Tourism Resort* dan *Lake Toba Flower Garden*. Keseluruhan pendanaannya ditangani oleh swasta.

Terkait dengan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Bappenas, Adhi Putra Alfian, menyampaikan bahwa diperlukan adanya kesinambungan antardokumen perencanaan. Menurutnya, kesinambungan antardokumen diperlukan dengan merujuk pada sasaran pokok RPJMN,

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Bappenas, Adhi Putra Alfian, menyampaikan bahwa diperlukan adanya kesinambungan antardokumen perencanaan.



Bangunan Pendukung Kebun Raya Baturraden

Sumber: PUPR

yang sepatutnya kemudian berlanjut pada RKP, Renstra, dan dokumen perencanaan turunannya.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar sasaran pokok dan sasaran pada RKP masih bersifat *output*. Ke depan, sasaran-sasaran itu perlu dirumuskan berdasarkan pada *outcome*, yang terkait dengan bidang PUPR. Hal tersebut terutama dalam rangka mengukur pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

Adapun strategi pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Strategi lainnya adalah meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar, dan meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah.

• Dalam penyusunan Renstra Teknokratik, BPIW telah melaksanakan beberapa kali Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unit organisasi (unor) Kementerian PUPR, PPN/ Bappenas, dan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara.

• Hasil dari beberapa pertemuan tersebut, BPIW telah menghasilkan rancangan peta strategi Kementerian PUPR dan unor. Direncanakan akan dilakukan koordinasi untuk menyepakati peta strategi tersebut bersama seluruh unor. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan akan menghasilkan hasil yang optimal, dalam menyusun Renstra Teknokratik, yang menjadi bagian dalam proses penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. **(Marina/Auliya/Redaksi)**



Sumber: Dok.BPIW

Pengembangan Kawasan Perkotaan Membutuhkan Perencanaan yang Baik

Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR

Pengembangan kawasan perkotaan dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan strategi perencanaan yang baik dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR Ir. Agusta Ersada

Sinulingga, MT saat dibincangi Buletin Sinergi beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apa fokus kegiatan pusat tersebut pada tahun ini dan bagaimana upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan?. Simak wawancara lengkapnya berikut ini.

Kegiatan apa yang menjadi fokus Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang sedang dikerjakan dan akan diselesaikan tahun 2018 ini ?

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan pada tahun 2018 ini lebih memfokuskan pada pencapaian target dari Perpres 2 Tahun 2015-RPJM 2015-2019 serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yakni penyusunan MPDP untuk beberapa program seperti penyusunan MPDP Metropolitan kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Mataram Raya untuk kawasan metropolitan.

Kemudian disusun MPDP untuk Kota Baru Banjarbaru dan Padang. Selain itu disusun MPDP untuk Kota Sedang yakni Kupang dan Ambon. Saat ini juga sedang disiapkan penyusunan MPDP juga untuk Kota Sedang yakni Lubuk Linggau, Prabumulih, Tasikmalaya, dan Kotamobagu.

Tidak hanya itu penyusunan MPDP juga dilakukan untuk Pusat Pertumbuhan Baru di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Bengkayang, Muna Barat, dan Konawe Selatan, serta Kota Kecil Skouw di Perbatasan Papua.

Pusat Pertumbuhan Baru lainnya yang disusun MPDP nya yakni Kabupaten Ngada dan Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian juga disusun MPDP untuk Kota Kecil Motamasin Kabupaten Malaka dan Kota Kecil Wini Kabupaten Timur Tengah Utara di Perbatasan Nusa Tenggara Timur.

Bagaimana tindak lanjut program pengembangan kawasan perkotaan yang sudah dijalankan tahun sebelumnya?

Program pengembangan kawasan perkotaan yang sudah dijalankan tahun sebelumnya dan realisasi MPDP yang sudah disusun BPIW selama tiga tahun terakhir akan kita kawal terus, mulai dari proses perencanaan hingga menjadi program. Untuk program ini menjadi kewenangan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur. Selain itu juga dilakukan proses evaluasi dan *updating* dari rencana yang telah dilakukan sebelumnya dengan menyesuaikan program yang menjadi kegiatan serta dinamika kebijakan yang ada.

Pembangunan infrastruktur dibangun berbasis pengembangan wilayah. Terkait hal itu, bagaimana caranya BPIW membuat program pengembangan perkotaan yang diselaraskan dengan pengembangan wilayah tersebut?

Proses penyusunan program pengembangan perkotaan melalui berbagai tahapan. Pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dimulai dari kajian kebijakan nasional dengan memperhatikan beberapa hal seperti RTRWN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Proyek Strategis Nasional dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN).

WPS memperhatikan juga kebijakan dari Kementerian/ Lembaga terkait diantaranya

“Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan pada tahun 2018 ini lebih memfokuskan pada pencapaian target dari Perpres 2 Tahun 2015, RPJM 2015-2019 serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)”.



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga (tengah) saat berbicara dalam sebuah kegiatan

Sumber: BPIW

SEBARAN LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN METROPOLITAN RPJMN 2015-2019

Metropolitan Sarbagita merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi salah satu kawasan yang diperhatikan oleh Pemerintah



perdesaan dikembangkan dengan tidak hanya menjual *raw material* (bahan baku) tetapi juga harus dapat melakukan pengolahan-pengolahan yang dapat meningkatkan *added value* (nilai tambah) dari komoditas unggulan sehingga dapat menghasilkan nilai jual produk yang tinggi.

Sebagai sentra pemasaran, kawasan perdesaan harus mampu memasarkan produk-produk unggulan mereka dengan mengembangkan pusat-pusat pemasaran di perdesaan dan juga dengan membangun keterkaitan dengan perkotaan (*urban rural linkage*) terdekat sebagai pusat pemasaran produk-produk unggulan perdesaan.

Bagaimana caranya agar program pengembangan kawasan perkotaan tetap memperhatikan kekhasan suatu daerah, misalnya areal persawahan, sehingga tidak ada areal persawahan yang tergerus karena pengembangan perkotaan?

Pengembangan kawasan perkotaan tetap mengacu pada rencana tata ruang, kesesuaian pola ruang dan dukungan infrastruktur. Dengan demikian kekhasan suatu daerah diharapkan dapat tetap terjaga.

Mengingat kawasan perkotaan dan perdesaan di Indonesia sudah sangat banyak, apakah ada skala prioritas dalam mengembangkan kawasan tersebut?

Pemilihan lokasi pengembangan kawasan metropolitan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada arahan yang terdapat dalam RPJMN. Ada 10 + 2 kawasan metropolitan yang perlu dikembangkan, sebagaimana arahan RPJMN 2015 – 2019, yakni Mebidangro, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Sarbagita,

Perindustrian, Perhubungan, Pertanian, Pariwisata. Selanjutnya, penyusunan program pengembangan juga mempertimbangkan kebijakan dan arahan sektor PUPR.

Bagaimana pula koordinasi BPIW dengan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait lainnya dalam mengembangkan perkotaan di tanah air?

Koordinasi dilakukan dengan selalu melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan MPDP kawasan perkotaan termasuk proses dilibatkannya pemerintah daerah dalam pembiayaan infrastruktur. Untuk instansi kementerian terkait dilibatkan dengan mempertimbangkan arahan kebijakan kementerian terkait, dilibatkan juga dalam proses penyusunan MPDP kawasan perkotaan melalui forum diskusi dan *workshop*.

Tidak hanya perkotaan, Pusat Pengembangan Perkotaan juga mengembangkan dukungan infrastruktur untuk kawasan

perdesaan. Apa yang menjadi fokus program yang dibuat BPIW terkait kawasan perdesaan tersebut?

Fokus pengembangan kawasan perdesaan diarahkan pada tiga sektor yaitu pada sektor sentra produksi,

“Fokus pengembangan kawasan perdesaan diarahkan pada tiga sektor yaitu pada sektor sentra produksi, sentra pengolahan dan sentra pemasaran. Sebagai sentra produksi, kawasan perdesaan difokuskan untuk dapat mengidentifikasi dan menentukan komoditas-komoditas unggulan yang akan menjadi basis ekonomi kawasan”

sentra pengolahan, dan sentra pemasaran. Sebagai sentra produksi, kawasan perdesaan difokuskan untuk dapat mengidentifikasi dan menentukan komoditas-komoditas unggulan yang akan menjadi basis ekonomi kawasan.

Sebagai sentra pengolahan, kawasan

Mamminasata, Palembang Raya, Bimindo, Banjarbakula, Mataram Raya, dan Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang.

Sementara itu, Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang PMK telah menetapkan 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang tersebar di 60 kabupaten di seluruh Indonesia. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dilakukan dengan mengacu pada ketetapan lokasi tersebut.

Sementara itu, terdapat 10 kota baru dan 22 kota otonom berukuran sedang dan perwujudan keterkaitan desa-kota dengan kekuatan 27 pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 13 pusat pertumbuhan di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang saat ini masih tinggi, seperti apa langkah Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mengatasi hal tersebut?

Ketimpangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dilakukan dengan tiga pendekatan, pertama, pengembangan kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis pengolahan potensi/komoditas unggulan kawasan dengan tujuan meningkatkan *added value* dari komoditas unggulan kawasan perdesaan. Kedua, mengembangkan kawasan perkotaan. Ketiga, mewujudkan *urban-rural linkage* (hubungan kota dan desa) dengan mengoptimalkan fungsi perdesaan sebagai tempat pengolahan komoditas menjadi produk unggulan perdesaan dan perkotaan sebagai tempat pemasaran produk-produk unggulan perdesaan.

Apakah yang menjadi tantangan dan bagaimana solusi dalam menjawab tantangan dalam membuat program pengembangan perkotaan di Indonesia?

Dalam membuat program pengembangan kawasan perkotaan, kita dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan itu diperlukan strategi perencanaan yang baik dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait. Tantangan lainnya adalah masalah disparitas pada kawasan perkotaan.

Solusi yang perlu dilakukan adalah upaya menentukan sektor ekonomi strategis yang dapat memacu pertumbuhan kawasan perkotaan. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan perkotaan dihadapkan pada masalah masalah pembiayaan infrastruktur. Untuk itu dibutuhkan strategi-strategi kreatif pembiayaan infrastruktur seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Badan Layanan Umum (BLU) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

“Dalam membuat program pengembangan kawasan perkotaan, kita dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan itu diperlukan strategi perencanaan yang baik dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait. Tantangan lainnya adalah masalah disparitas pada kawasan perkotaan”.

Apa yang menjadi impian dan harapan Bapak dalam hal pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Indonesia?

Dalam hal pengembangan kawasan perkotaan, impian dan harapan saya adalah mewujudkan sinergi dalam pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan strategis lainnya yang berbasis keterpaduan wilayah sesuai dengan WPS. Hal ini untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih berkualitas. **(Tim Redaksi)**



“Ketimpangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dilakukan dengan tiga pendekatan, pertama, pengembangan kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis pengolahan potensi/komoditas unggulan kawasan dengan tujuan meningkatkan *added value* dari komoditas unggulan kawasan perdesaan”.

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini dua potongan pemberitaan terpilih pada bulan Mei.

Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook

Integrated Rest Area Angkat Potensi Daerah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat Integrated Rest Area (Anjungan Cerdas) sejak 2016 lalu. Konsep tempat singgah di jalan nasional yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR ini dapat mengangkat potensi daerah seperti pariwisata dan hasil produk daerah.

Sebelumnya konsep tersebut dikenal sebagai "Anjungan Cerdas" yang sekarang lebih populer dengan nama "Integrated Rest Area" atau "Tempat Singgah Terpadu". Integrated Rest Area merupakan perwujudan dari amanat Pasal 90 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudi kendaraan selama empat jam bermutu-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam".

Pt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyatakan konsep pengembangan tempat singgah yang terpadu ini diadopsi dari konsep Michi no Eki di Jepang dan Inter State Rest Area di Amerika Serikat, yang berperan sebagai tempat peristirahatan juga menjadi sarana promosi pariwisata dan produk lokal. Hal tersebut juga diterangkan di dua percontohan Integrated Rest Area yang saat ini dikembangkan BPIW di kawasan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dan di kawasan Rambut Siwi Kabupaten Jember. Provinsi Bali. Dua lokasi itu berada di jalan nasional dan menjadi percontohan yang ditargetkan pada tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Integrated Rest Area merupakan tempat peristirahatan yang terintegrasi atau terpadu, di mana ada ruang untuk mempromosikan produk khas daerah dan tempat untuk menampilkan seni dan budaya daerah, seperti di Bali ada tempat untuk karsapan sapi. Selain itu juga ada amphitheater atau gelanggang terbuka untuk pertunjukan seni dan hiburan," ungkap Lana.

Menurut Lana konsep operasionalisasi Integrated Rest Area ini terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, perencanaan dan pembangunan Integrated Rest Area. Dalam tahap ini perencanaan dan pembangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Setelah perencanaan dan pembangunan, maka tahap kedua yang dilakukan adalah MOU atau kesepakatan pengelolaan Integrated

Rest Area Kesepakatan ini dilakukan antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah setempat.

Tahap ketiga adalah pembentukan dan penetapan pengelola anjungan cerdas, di mana nantinya akan ada Pengelola Integrated Rest Area. "Bila pengelola sudah terbentuk maka tahap keempat yang harus dilakukan adalah perjanjian kerja sama pengisian space anjungan itu," tutur Lana. Untuk itu dilakukan kerja sama dengan tenant. Tahap kelima yang harus dilakukan adalah operasionalisasi Integrated Rest Area yang meliputi operasionalisasi dan Integrated Rest Area tersebut.

INTEGRATED REST AREA BALI

Konsep pengembangan Integrated Rest Area Rambut Siwi di Bali memuat setidaknya enam kluster bisnis. Pertama yaitu kuliner yang meliputi berbagai masakan dan hidangan khas lokal yang berasal dari daerah sekitar.

Kedua, industri kreatif yang meliputi berbagai hasil industri lokal (petanian dan keluturan) sesuai dengan potensi khas daerah sekitar. Kluster bisnis yang ketiga yakni industri agro yang meliputi berbagai produk industri kreatif yang dihasilkan oleh penduduk lokal dan khas daerah sekitar. Kluster bisnis yang keempat adalah wisata yang meliputi berbagai jenis titik wisata dan ragam hiburan sebagai tempat tujuan wisata pengunjung. Selanjutnya, kluster bisnis yang kelima adalah kesenian budaya yang meliputi kesenian autentik khas budaya daerah sekitar.

Kluster yang terakhir adalah edukasi yang menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat mengenai manfaat serta pentingnya Integrated Rest Area dan Infrastruktur PUPR secara menyeluruh.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Hadi Sucihyono Integrated Rest Area dirancang sebagai contoh, sehingga bisa direplikasi di lokasi lain oleh unit organisasi lain misalnya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Dibangun diatas tanah seluas kurang

INTEGRATED REST AREA (TEMPAT SINGGAH TERPADU) RAMBUT SIWI

INTEGRATED REST AREA (TEMPAT SINGGAH TERPADU)

Keberhasilan pembangunan Integrated Rest Area (Tempat Singgah Terpadu) yang terintegrasi dengan kawasan wisata akan meningkatkan potensi ekonomi daerah. Konsep ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

INTEGRATED REST AREA (TEMPAT SINGGAH TERPADU)

Keberhasilan pembangunan Integrated Rest Area (Tempat Singgah Terpadu) yang terintegrasi dengan kawasan wisata akan meningkatkan potensi ekonomi daerah. Konsep ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KLUSTER BISNIS INTEGRATED REST AREA (TEMPAT SINGGAH TERPADU)

1. Kuliner
Melakukan kerjasama dengan berbagai pelaku usaha kuliner lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

2. Industri Kreatif
Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha industri kreatif lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

3. Industri Agro
Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha industri agro lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

4. Kesenian Budaya
Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha kesenian budaya lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

5. Edukasi
Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha edukasi lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

6. Wisata
Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha wisata lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

PEMBANGUNAN INTEGRATED REST AREA (TEMPAT SINGGAH TERPADU)

1. Perencanaan
Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan Integrated Rest Area.

2. Pembangunan
Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan Integrated Rest Area.

3. Operasionalisasi
Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan operasionalisasi Integrated Rest Area.

4. Pemeliharaan
Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeliharaan Integrated Rest Area.

lebih lima hektar. Integrated Rest Area dikembangkan dengan memperhatikan best wisdom atau kearifan lokal yang mengakomodasi arsitektur Bali "jadi local wisdom yang bersifat sosial budaya kita fasilitas", ucap Hadi.

Bangunan juga dilengkapi dengan fasilitas umum berupa toilet, resto-

ran, lahan parkir yang luas, ATM, lokasi ibadah seperti pura, anjungan produk lokal, dan ruang serba guna yang dapat dijadikan tempat untuk pameran. "Jadi kawasan ini harus distimulasikan pada fungsi sosial, budaya, dan edukasi", lanjut Hadi. Menurut Hadi, Integrated Rest Area

Siwi merupakan jalur ramal yang dilalui kendaraan dari Surabaya dan Banyuwangi menuju Kuta, sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

INTEGRATED REST AREA DALAM KONTEKS WILAYAH PENGEM-

BANGUNAN STRATEGIS (WPS)

Dalam membangun infrastruktur sektor PUPR, Kementerian PUPR membangun Integrated Rest Area sebagai implementasi dari pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang memfokuskan pengembangan wilayah dengan kebutuhan masyarakat dan swasta. Pembangunan Integrated Rest Area di Trenggalek dan Rambut Siwi diharapkan akan mendukung pengembangan wilayah tersebut dan sekitarnya.

Integrated Rest Area atau kawasan inkubasi Rambut Siwi Jember terdapat di WPS 15 pertambangan terpadu WPS Gilmaruk-Dempas-Padang Bay dengan potensi pengembangan pariwisata pertanian, perikanan tangkap, agro industri berbasis pemberdayaan masyarakat, industri sedang dan kecil yang mendorong pengembangan wilayah Bali Barat.

INTEGRATED REST AREA DI JAWA TIMUR

Seperti Jember, Integrated Rest Area di Trenggalek, Jawa Timur juga memiliki beberapa fasilitas yaitu amphitheater, ATM, gedung convention, gedung pengelola anjungan, dan gedung galeri. Selain itu juga ada kantor bersama, ruang komulti, masjid, dan Plaza Iconic, serta dilengkapi dengan restoran dan toilet. Tempat singgah ini berdekatan dengan Bendungan Tugu yang diharapkan menjadi embrio pariwisata di kawasan tersebut.

BERDAMPAK POSITIF BAGI DAERAH

Pembangunan Integrated Rest Area ini sangat disambut baik Pemerintah Kabupaten Jember. Bupati Jember Putu Artha bahkan merasa optimis Integrated Rest Area yang dibangun Kementerian PUPR, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerahnya dan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Selain itu, hal ini akan dapat meningkatkan kontribusi peran swasta dan masyarakat di wilayah tersebut. "Integrated Rest Area ini merupakan pengembangan yang luar biasa dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bagi kemajuan daerah kami," ucap Putu Artha. Putu Artha juga meyakini dengan tempat singgah terpadu ini merupakan kesempatan untuk memunculkan berbagai komoditas daerah. (*)



Ulasan Teropong Media di edisi kali terkait berita di Bisnis Indonesia, 23 Mei 2018 di Halaman 13 yang diberi judul “*Integrated Rest Area* Angkat Potensi Daerah”. Berikut ulasannya :

***Integrated Rest Area* Akan Dikembangkan Untuk Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional**

Dalam berita itu disebutkan bahwa “*Integrated Rest Area*” atau “Tempat Singgah Terpadu” yang sebelumnya dikenal sebagai “Anjungan Cerdas” itu, merupakan sarana untuk mengangkat potensi daerah. Hal itu dapat dilakukan karena areal untuk beristirahat bagi pengendara kendaraan bermotor yang berada di jalan nasional tersebut, memiliki tempat untuk mempromosikan produk lokal dan promosi pariwisata, serta tempat untuk menampilkan seni dan budaya daerah setempat.

Konsep pengembangan tempat peristirahatan terintegrasi yang dikembangkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, diadopsi dari konsep *Michi no Eki* di Jepang dan *Inter State Rest Area* di Amerika Serikat.

Ada dua tempat yang dikembangkan BPIW sebagai percontohan *Integrated Rest Area* yakni di kawasan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dan di kawasan Rambut Siwi Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Ditargetkan pada tahun 2018 ini, dua tempat tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tidak hanya di dua kawasan tersebut, kini Kementerian PUPR tengah menjajaki pembangunan kawasan inkubasi tersebut di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Sumatera Utara. Kawasan wisata tersebut dianggap potensial untuk dibangunnya anjungan ini.

Rencana pembangunan anjungan cerdas itu merupakan tindak lanjut dari saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat berkunjung ke Danau Toba beberapa waktu yang lalu. Saat itu Jokowi menyarankan agar dapat dibangun semacam *rest area* di sekitar jalan dari bandara Silangit menuju ke Parapat.

Saran dari Presiden ini kemudian ditindaklanjuti Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dengan memberikan arahan kepada BPIW. Selanjutnya BPIW melakukan koordinasi dengan unit organisasi lain serta pemerintah daerah untuk penajakan pembangunannya.

Pendanaan anjungan ini kemungkinan memanfaatkan bantuan dari Bank Dunia, mengingat pengembangan pariwisata di KSPN Danau Toba, Borobudur, dan Lombok mendapatkan bantuan dari bank tersebut.

Setidaknya ada tiga titik yang menjadi lokasi dibangun anjungan ini. Salah satunya tidak jauh dari bandara Silangit, yakni di daerah Balige. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi anjungan cerdas, yakni tidak jauh dari bandara, luas lahan memadai, dan volume lalu lintas harian yang tinggi.

Sementara lahan yang dibutuhkan idealnya antara tiga hingga lima hektar. Untuk lahannya, diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat seperti yang telah diterapkan di Jembrana Bali. Pembangunan anjungan ini juga dapat menjadi penunjang kenyamanan wisatawan di kawasan pariwisata. Dengan dukungan yang diberikan Kementerian PUPR melalui anjungan cerdas ini, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan mengangkat potensi wisata yang ada di daerah tersebut. **(Hendra)**

BPIW Komitmen untuk Terus Membangun Budaya Kerja yang Kondusif

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja yang kondusif di lingkungan BPIW.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, esensi pengelolaan negara yang efektif dari sisi manajemen memiliki peran dalam menciptakan

“Para pegawai BPIW perlu berplikir *out of the box* (keluar dari biasanya,-red) dalam rangka mencari formulasi perencanaan dan pemrograman sesuai garis tujuan dari sejak didirikannya BPIW,” ungkap Firman.

kelancaran operasional dan produktivitas organisasi kerja. Salah satunya melalui budaya kerja yang kondusif.

“Unit organisasi yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia,-red) bagus dan anggaran besar tidak menutup kemungkinan mengalami kegagalan, karena budaya kerja yang tidak sesuai tujuan organisasi.

Sebaliknya, unit organisasi yang sama, dengan anggaran seadanya dapat tumbuh baik karena ada budaya kerja yang kondusif,” ungkap Firman saat membuka acara Internalisasi dan Dukungan Dimensi Religi dalam Penerapan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIW, di Jakarta, Kamis (31/5).

Firman meyakini, budaya kerja yang tepat akan mendukung kinerja pegawai mencapai sasaran mutu yang efektif. “Para pegawai BPIW perlu berplikir *out of the box* (keluar dari biasanya,-red) dalam rangka mencari formulasi perencanaan dan pemrograman sesuai garis tujuan dari sejak didirikannya BPIW,” ungkap Firman.

Lanjutnya, ia berharap kegiatan ini dapat menambah pemahaman pegawai mengenai peraturan kepegawaian. Sehingga, memudahkan Sekretariat BPIW yang berkewajiban memberikan dukungan manajemen kepada seluruh jajaran di lingkungan BPIW, untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Firman menerangkan bahwa Sekretariat BPIW juga dapat berperan aktif untuk mendukung pencapaian tugas substantif.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,



Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu sedang memberi arahan

Sumber: Dok. BPIW

Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Respanti Yuwono mengungkapkan seluruh pegawai di Kementerian PUPR memang senantiasa didorong untuk memegang budaya kerja Kementerian PUPR. Seperti, bekerja dengan orientasi pencapaian misi. “Yakni tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai,” terangnya.

Kemudian, meningkatkan kerja sama tim untuk mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dan mempunyai kejujuran, profesional serta akhlakul karimah. Semua itu dijadikan nilai budaya organisasi Kementerian PUPR yang kemudian disebut IPROVE (Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, Etika – Akhlakul Karimah).

Ia juga menambahkan, ASN memiliki tiga peran, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, ketiga peran ini harus diiringi dengan nilai budaya kerja

sehingga mendesain karakter servis. “Bagaimana orang yang bertugas memiliki karakter melayani,” terangnya.

Sebelum berakhir, acara dilanjutkan kembali dengan dukungan dimensi religi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dari Ustadz Abdi Kurnia Djohan. Ia memaparkan,

ASN memiliki tiga peran, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Iseman dan Islam harus berbuah pada perbuatan, bukan sebatas ucapan yakni berupa takwa. “Jadi umat Islam yang mengaku beriman, tidak cukup dengan pengakuan saja, namun harus berimplikasi pada perbuatan sehari-

hari,” terangnya. Ia menerangkan, seseorang akan dipercaya jika perbuatan dan ucapannya sama. Dalam konteks pekerjaan dalam agama Islam itu disebut amanah. Selain itu, Djohan menegaskan, nilai-nilai keimanan perlu diinternalisasikan dalam kehidupan. “Jadikanlah bekerja sebagai bagian dari amal soleh, itulah integrasi antara nilai religi di dalam budaya kerja” jelasnya.

Kalau dikaitkan, ibadah dan kinerja tergantung kepada bagaimana diri kita membangun *mindset*. “Jika kita menjadikan kerja sebagai amal soleh, hal itu akan membuat ibadah tidak akan mengganggu pekerjaan, justru peningkatan kualitas

ibadah pasti akan beriringan dengan peningkatan kualitas kerja” ujarnya. **(ris/bil/InfoBPIW)**

Sistem Informasi Pemrograman BPIW Diharapkan Menjadi *Database* Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan konsinyasi terkait pengembangan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) di Jakarta (11/05).

Saat membuka kegiatan tersebut Kepala Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto menyatakan konsinyasi

sistem pemrograman sendiri, namun SIPro dapat digunakan, sebagai *tools* yang mengkompilasikan sistem pemrograman dari unor-unor.

"Sebaiknya juga diberikan kewenangan bagi unor untuk mengakses, sehingga data yang ada di dalam SIPro selalu dapat *ter-update*," ujar Iwan. Dengan sistem ini, Iwan berharap suatu saat Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) tidak perlu lagi dilakukan dengan tatap muka dan dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana terkait urusan data.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Anggaran Umum Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Erwin Adhi Setyadi menambahkan SIPro sudah digunakan sejak Pra Konreg 2016 lalu. Namun kedepan Erwin berharap SIPro dapat terkoneksi dengan Sistem Informasi Berbasis *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (SIBAS RIPI).

Dalam acara yang dihadiri pejabat di Lingkungan BPIW ini dibahas mengenai rencana dikembangkannya SIPro oleh Sekretariat BPIW di tahun 2019. Dengan demikian sistem tersebut tidak lagi seolah-olah milik Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, tetapi menjadi sistem dari BPIW.

Meskipun masing-masing unor mempunyai sistem pemrograman sendiri, namun SIPro dapat digunakan, sebagai *tools* yang mengkompilasikan sistem pemrograman dari unor-unor.

dilakukan agar pengembangan SIPro dapat mengakomodir *output* perencanaan dan pemrograman di BPIW.

Selain itu menurut Iwan, SIPro dapat menjadi referensi para pejabat dan menjadi sistem pemrograman yang menjadi acuan bagi unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.

Dikatakannya juga bahwa meskipun masing-masing unor mempunyai



Iwan Nurwanto saat memberikan arahan.

Sumber: Dok. BPIW

"Kedepan SIPro diharapkan dapat menjadi sistemnya Kementerian PUPR," ujar Erwin.

Pada kesempatan itu Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Benny Hermawan berharap SIBAS RIPI dan SIPro dapat menjadi *platform* dari semua sistem informasi yang ada dan berkoneksi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"SIPro diharapkan lebih kompatibel terhadap sistem-sistem yang ada," ujar Benny. Sementara itu Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Brawijaya menyatakan pada umumnya semua pihak ingin membuat sistem secara online masing-

masing. Namun yang terpenting menurutnya adalah sebuah sistem harus memiliki *database*. Terkait rencana dikembangkannya SIPro oleh Sekretariat

SIBAS RIPI dan SIPro dapat menjadi *platform* dari semua sistem informasi yang ada dan berkoneksi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

BPIW pada 2019 mendatang, menurut Kepala Bagian Program Dan Evaluasi, M. Salahudin Rasyidi, unit kerjanya

sudah membuat draft *road map* sistem informasi. Saat ini *road map* tersebut sedang diproses Sekretaris BPIW.

Setelah dilakukan kegiatan konsinyasi ini, maka selanjutnya akan dibuat survei kebutuhan pengisi SIPro kepada Eselon 3 dan 4.

Data dari survei, menjadi sumber untuk menentukan timeline pengembangan SIPro (2018 dan 2019). Pada Juli mendatang akan diadakan kembali Rapat Pembahasan Progres SIPro. **(Disa/Hen/infobpiw)**

BPIW Susun Pedoman Tata Cara Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* WPS

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis tahun ini mulai menyusun Pedoman Tata Cara Penyusunan *Masterplan* atau Rencana Induk dan *Development Plan* (MPDP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Sebagai langkah awal, Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis telah membahas hal tersebut dalam suatu diskusi di Bandung pada 4 Mei lalu. Tujuan utama dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu membahas ruang lingkup substansi meliputi proses serta prosedur dari tiap tahapan penyusunan dokumen MPDP WPS.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Hadi Suahyono, pada pembukaan acara menyatakan bahwa perlunya standarisasi terkait proses dan prosedur penyusunan MPDP. Selanjutnya Hadi menegaskan pentingnya dokumen MPDP WPS sebagai *executive summary* (ringkasan eksekutif) dan

policy recommendation (rekomendasi kebijakan) yang ringkas bagi pengambil keputusan. Selain itu, ia menambahkan, perlunya *benchmarking* (perbandingan) antara dokumen MPDP WPS dengan kegiatan lain yang sedang berjalan, contohnya *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP), supaya hadir kesetaraan kedalaman dan ketajaman substansi.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemaparan berbagai sudut pandang narasumber, antara lain Hendricus Andy Simarmata dari Pusat Riset Perkotaan dan Wilayah, Universitas Indonesia yang pernah bergabung dalam Tim Penyusun MPDP WPS 12 Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang.

Hendricus menyatakan perlu adanya Peraturan Menteri PUPR yang mengatur tentang panduan penyusunan rencana dan pemrograman pembangunan dalam WPS. Menurutnya, dalam peraturan menteri tersebut akan diatur perihal bagaimana seharusnya dokumen MPDP WPS ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait.

Andry Krisnaldi dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung ikut melengkapi persektif pembicaraan. Andry yang pernah bergabung dalam tim penyusunan MPDP WPS 29 Ambon-Masohi, menyarankan agar deliniasi WPS lebih berbasis pada fungsi, sebab pusat-pusat pertumbuhan yang tumbuh biasanya tak selalu berbasis administrasi. Sedangkan *ultimate* WPS menurutnya diperoleh dari profil WPS, kebijakan terkait WPS, dan isu strategis yang dapat didapatkan dari literatur atau survei lapangan.

Sedangkan skenario Pengembangan Wilayah harus merujuk pada profil dan *ultimate* yang diinginkan. Tema pengembangan skenario wilayah yang harus dipertimbangkan antara lain terkait perwujudan konektivitas, ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas hidup, dan kawasan inkubasi.

Dalam acara ini dibicarakan juga perihal rancangan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (RIPI) Pulau/Kepulauan yang sedang dalam proses pembahasan dengan unit organisasi lainnya dan bidang hukum.

RIPI direncanakan memiliki legalitas berbentuk peraturan menteri yang merupakan rencana induk berisi rencana jangka panjang dan dipecah ke dalam rencana jangka menengah. Penyusunan RIPI menggunakan pendekatan Kawasan Pengembangan Prioritas (KPP) dan tidak berfokus pada WPS, namun KPP tersebut diharapkan menjadi masukan dalam penajaman deliniasi WPS.

Diskusi dalam kegiatan ini menyimpulkan bahwa pembuatan dokumen tata cara penyusunan MPDP WPS harus bersifat adaptif dan fleksibel serta memberikan ruang terhadap perbedaan kebutuhan analisis, yang disebabkan oleh perbedaan tipologi perkembangan dan karakteristik wilayah masing-masing WPS.

Dokumen Pedoman itu perlu juga menyebutkan bahwa penyusunan MPDP WPS harus mempertimbangkan analisis corak ekonomi (di dalam dan antar wilayah), konektivitas (dalam WPS, antar WPS dan dengan wilayah non

Tujuan utama dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu membahas ruang lingkup substansi meliputi proses serta prosedur dari tiap tahapan penyusunan dokumen MPDP WPS.



Saat diskusi penyusunan pedoman tata cara penyusunan MPDP WPS

Sumber: Dok. BPIW

WPS), analisis ketimpangan wilayah, analisis *backbone*, analisis lokasi kantong produksi dan pengembangan komoditas, dan analisis kependudukan. Tidak hanya itu, perlu juga disebutkan mengenai analisis potensi wilayah, serta analisis kebutuhan dan keterpaduan infrastruktur PUPR.

Lebih jauh lagi, penyusunan MPDP WPS diharapkan lebih memperhatikan aspek sosial ekonomi dan kebutuhan komunitas, baik yang sudah ada atau akan terbentuk dalam WPS.

Kesimpulan lain adalah MPDP WPS harus mampu mengintegrasikan analisis fisik dan lingkungan ke dalam perencanaan. MPDP WPS pun seharusnya dapat mengintegrasikan analisis pengukuran dampak ekonomi misalnya dengan menggunakan *dynamic modelling*. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu, akan dilakukan diskusi lanjutan yang

direncanakan melibatkan akademisi yang berpengalaman menyusun MPDP WPS dan seluruh tingkat eselon II internal BPIW untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dalam

Penyusunan MPDP WPS diharapkan lebih memperhatikan aspek sosial ekonomi dan kebutuhan komunitas, baik yang sudah ada atau akan terbentuk dalam WPS.

penyempurnaan tata cara penyusunan dokumen MPDP WPS

Sementara itu tetap akan dilakukan koordinasi dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat BPIW selama proses penyusunan dokumen Tata Cara Penyusunan MPDP WPS. Lalu proses penyusunan dokumen ini pun akan

dilaksanakan secara paralel dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disusun oleh Bagian Sub Bagian Hukum Sekretariat BPIW.

Selain dihadiri para narasumber, kegiatan ini juga dihadiri oleh para staf dan jajaran pimpinan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi Sekretariat BPIW yang mana juga merupakan para penentu suksesnya pembuatan pedoman tata cara penyusunan MPDP WPS di BPIW. **(Rizkita/Hen/infobpiw)**

Juli 2018, *Integrated Rest Area* Direncanakan Resmi Beroperasi

Integrated Rest Area yang diinisiasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) direncanakan pada Juli mendatang dapat diresmikan operasionalnya, agar manfaatnya dapat segera dinikmati khalayak umum.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW telah melaporkan perkembangan terakhir *Integrated Rest Area* Rambut Siwi di Bali dan rencana pengelolaannya kepada Sekretariat BPIW.

"Kemudian diharapkan Sekretariat BPIW dapat segera melaporkan *Integrated Rest Area* serta memohon keputusan pengelolaan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR,"



Integrated Rest Area Rambut Siwi, Bali.

ungkap Hadi saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Operasionalisasi dan Pengelolaan *Integrated Rest Area* Rambut Siwi, Bali di Kantor BPIW, akhir pekan kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini pembangunan *Integrated Rest Area* Rambut Siwi sudah hampir tuntas 100 persen.

"Kini dilakukan uji coba operasional beberapa komponen, seperti lampu dan lainnya." ujar Hadi.

Terkait pengelolaannya, lanjut Hadi, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW mengusulkan beberapa alternatif pengelolaan. "Opsi pertama, pengelolaan *Integrated*

Rest Area Rambut Siwi dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui BPIW dengan struktur PPK (Pejabat Pembuat Komitmen,-red) dalam kurun waktu tertentu, serta memanfaatkan APBN sebagai dana operasional dan pemeliharaan," terang Hadi.

Opsi kedua, lanjutnya, pengelolaan dilakukan dengan sistem sewa atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dalam kurun waktu tertentu, dengan potensi pendapatan dari PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak,-red) dan menggunakan skema tender khusus KSP.

sebelum peresmian *Integrated Rest Area* ada baiknya dilakukan pengisian *tenant-tenant* yang mempromosikan produk unggulan daerah.

Selain itu, lanjutnya, pelengkapan fasilitas lainnya seperti mesin ATM dan lainnya agar dapat terisi. "Agar pada saat peresmian Juli 2018 oleh pejabat di Kementerian PUPR, *Integrated Rest Area* sudah mulai ramai dan banyak aktivitas sesuai dengan tujuan awal pembangunan" terangnya.

Seperti diinformasikan sebelumnya, saat ini BPIW menginisiasi dua

Pembangunnya sendiri diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, serta memiliki fungsi sosial, rekreasi, budaya, dan edukasi.

Saat ini BPIW menginisiasi dua *integrated rest area* yang menjadi percontohan, yakni di Rambut Siwi, Jembrana, Bali dan Trenggalek, Jawa Timur. Keberadaan *Integrated rest area* ini dilengkapi dengan toilet kelas internasional, restoran, lahan parkir yang luas, ATM, tempat beribadah, anjungan produk lokal, dan ruang serba guna.

Integrated rest area ini diadopsi dari *Michi no Eki* di Jepang dan *Inter State Rest Area* di Amerika Serikat yang tidak hanya sebagai tempat istirahat, namun menjadi sarana promosi pariwisata dan produk lokal. (ris/infoBPIW)



Sumber: Dok BPIW

"Untuk opsi ketiga, pengelolaan dilakukan secara bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui skema Pinjam Pakai, dimana aset *Integrated Rest Area* harus mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah," jelasnya.

Di tempat sama, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi, Sesba BPIW, P. Yudantoro mengatakan,

Integrated rest area yang menjadi percontohan, yakni di Rambut Siwi, Jembrana, Bali dan Trenggalek, Jawa Timur. Keberadaan *Integrated Rest Area* ini dilengkapi dengan toilet kelas internasional, restoran, lahan parkir yang luas, ATM, tempat beribadah, anjungan produk lokal, dan ruang serba guna yang dapat dijadikan tempat untuk pameran.

BPIW Susun *Grand Design* TIK yang Terintegrasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyusunan *grand design/roadmap* pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan BPIW sebagai acuan pengembangan TIK lebih lanjut. Kemudian, *grand design* tersebut juga dilakukan untuk terintegrasi ke dalam cetak biru TIK Kementerian PUPR.

Hal itu terungkap dalam acara Pembahasan Rancangan *Grand Design/Roadmap* Pengembangan Sistem Informasi BPIW 2018-2021 di Bintaro, Banten, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dihadiri juga Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekjen Kementerian PUPR, Dwi Budi Utami.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengungkapkan, kegiatan tersebut digelar bagian dari mendukung kegiatan *Review* Cetak Biru TIK Kementerian PUPR yang dilakukan Sekretariat

Jenderal Kementerian PUPR. Untuk mewujudkan TIK yang dikembangkan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dapat terintegrasi dalam satu sistem.

Pembahasan tersebut juga dimaksudkan untuk merancang *grand design* pengembangan TIK di lingkungan BPIW sebagai *tools* untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPIW. "Tentunya dalam melakukan perencanaan, pemrograman dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di suatu wilayah atau kawasan," papar Firman.

Saat ini, lanjutnya, BPIW tengah mengembangkan sejumlah sistem aplikasi TIK, seperti SIBAS RIPI (Sistem Informasi dan *Data Base Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur,-

red) yang dilakukan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, SIPro (Sistem Informasi Pemrograman,-red) yang dilakukan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, SIMONAH (Sistem Monitoring Tanah,-red) yang dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis serta *Database* Perkotaan yang dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

la berharap, empat aplikasi yang tengah dibangun dan dikelola BPIW tersebut tidak mengelola data dalam skala yang sama, namun mengelola data berbasis peta dan informasi yang ditampilkan berdasar pada pola dan struktur infrastruktur PUPR.

"Kemudian aplikasi tersebut juga harus tetap memisahkan informasi yang dapat diakses oleh internal dan eksternal. Sehingga, masing-masing aplikasi tersebut harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan alur kerja yang dilaksanakan di BPIW," papar Firman.

Dalam kerangka kerja BPIW, menurut Firman, sistem informasi berfungsi sebagai input sehingga aplikasi di BPIW dapat mengelola data perencanaan infrastruktur PUPR. Sebab, semua pekerjaan di BPIW mengacu pada data perencanaan.

"Kemudian data yang dimiliki dalam aplikasi BPIW harus dibangun menjadi sistem informasi terpadu yang berbasis wilayah atau kawasan, sehingga sistem informasinya dapat dikembangkan menjadi *Executive Information System* (EIS) atau sistem yang memungkinkan menjadi acuan pimpinan untuk mengambil keputusan cepat serta akurat berdasarkan data-data yang tersaji," jelasnya. **(far/ris/infoBPIW)**

**Judul Buku :**

Panduan *Urban Redevelopment* Kawasan Perkotaan

Pengarang :

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penerbit : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Tahun Terbit : 2015

Jumlah Halaman: 142 halaman

Upaya Antisipasi Perkembangan Kota

Kota akan terus tumbuh secara alamiah sejalan dengan perkembangan kegiatannya secara fisik struktural. Dengan adanya proses perkembangan tersebut, kota seringkali tidak memperhatikan kemampuan, keseimbangan, dan keserasian yang seharusnya dimiliki oleh suatu kawasan perkotaan. Pertumbuhan kegiatan industri berkembang pesat, penerapan teknologi baru dalam pemenuhan kebutuhan kota, dan kegiatan lainnya yang mengancam kenyamanan kota. Hal tersebut sangat berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas perkotaan. Selain itu juga perkembangan dan pertumbuhan kota yang ekstensif mengakibatkan adanya perubahan sosial, ekonomi, dan fisiknya serta menuntut kebutuhan yang lebih besar untuk memenuhi seluruh aktivitas kota.

Menanggapi fenomena di atas, ada tiga upaya yang dapat ditempuh yaitu: Pertama, meningkatkan kemampuan kota secara intensif dengan melakukan pembangunan kembali yang mencakup usaha peningkatan kualitas lingkungan, rehabilitasi, renovasi, dan revitalisasi bagian wilayah kota yang dianggap mengalami degradasi. Kedua, meningkatkan kemampuan kota secara ekstensif yaitu dengan memperluas ruang serta membuka wilayah-wilayah baru pada kawasan pinggiran kota yang belum berkembang. Ketiga, membangun kota baru baik di dalam wilayah kota itu sendiri atau di wilayah luar yang tidak terlalu jauh.

Dalam buku panduan ini, upaya antisipatif terhadap perkembangan kota akan difokuskan pada upaya pertama yaitu Pembangunan Kembali/ *Urban Redevelopment*. *Urban Redevelopment* adalah suatu upaya untuk menata kembali suatu atau beberapa wilayah kota atau kawasan fungsional kota secara menyeluruh dengan maksud meningkatkan kembali kualitas kehidupan serta meningkatkan vitalitas sosial, ekonomi, serta lingkungan fisiknya.

Buku ini dibagi menjadi 10 bagian, yang setiap bab nya membahas tahap-tahap/ panduan proses pelaksanaan Pembangunan Kembali di kawasan perkotaan. Tahap satu sampai empat memaparkan mengenai langkah-langkah permulaan seperti pemaparan pihak-pihak yang terlibat dan pembentukan lembaga pengelola. Tahap ke lima, membahas transformasi sosial ekonomi masyarakat. Tahap ke enam mengupas analisis dampak. Tahap ke tujuh hingga sepuluh pembahasan mengenai pembiayaan, pelaksanaan pembangunan, dan monitoring evaluasi. Dengan adanya buku ini, diharapkan pemerintah daerah, pemerhati perkotaan, dan pemangku kebijakan memperoleh pendekatan yang tepat untuk membangun kawasan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan adanya buku ini, diharapkan pemerintah daerah, pemerhati perkotaan, dan pemangku kebijakan memperoleh pendekatan yang tepat untuk membangun kawasan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu Kawasan Pariwisata Pantai Tanjung Kelayang “Geotourism and Marine Recreation Destination”

KSPN Tanjung Kelayang merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Palembang-Bangka-Belitung dek dsK, yang terintegrasi dengan KSPN Palembang Kota, KPPN Belinyu, KPPN Pangkal Pinang-Sungailiat, KPPN PunaiBelitung. Dari area tersebut, fokus pemrograman berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang. Meski demikian, kawasan pemrograman tidak hanya terbatas pada area Tanjung Kelayang, melainkan juga meliputi regional supportnya. Pemrograman untuk regional support meliputi konektivitas antara KSPN Tanjung Kelayang dengan Perkotaan Tanjung Pandan, Kawasan Bandara HAS Hanandjoedin, serta dengan DTW lainnya yang berada di

luar KSPN, yakni Kawasan Selat Nasik hingga Membalong. Hal ini dimaksudkan agar pemrograman nantinya tidak hanya meliputi internal kawasan, melainkan juga eksternalitas yang terkait dan dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja kawasan.

Lokasi kawasan pengembangan pariwisata pantai KSPN Tanjung Kelayang memiliki target market potensial dari Kota-Kota Besar yang ada di sekitarnya, termasuk Singapura. Beberapa kota besar yang memiliki penduduk cukup potensial sebagai target wisatawan Belitung antara lain adalah Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bandung, dan beberapa kota besar di pulau Sumatera. Jarak yang relatif dekat dengan harga tiket perjalanan yang relatif murah menjadi salah satu faktor pendukung yang menyebabkan segmentasi wisatawan lokal mudah untuk mengakses objek wisata yang ada di Belitung. Secara nasional jumlah penduduk Indonesia dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas yaitu sekitar 50 persen dari jumlah penduduk total

Dalam rangka pengembangan pariwisata, saat ini kawasan KSPN Tanjung Kelayang sudah didukung oleh jaringan transportasi udara dan laut yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan telah berstatus jalan nasional. Bandara H.AS Hanandjoeddin di Tanjung Pandan merupakan simpul transportasi utama yang berperan penting sebagai entry point wisatawan. Hingga saat ini bandara mampu didarati oleh pesawat jenis kecil seperti Twin Otter hingga pesawat berkapasitas besar seperti airbus 737-800 dengan 8 (delapan)



Gambar 1. Kawasan Pemrograman Mencakup Delineasi Kawasan, Fokus Pemrograman dan Regional Support



Gambar 2. Potensial Target Market Wisatawan dan Dukungan Simpul Utama Transportasi Nasional dan Regional

penerbangan langsung domestik setiap harinya yang menuju Kabupaten Belitung. Penerbangan terbagi menjadi 6 (enam) jalur penerbangan Jakarta – Tanjungpandan dan 2 (dua) penerbangan Pangkalpinang – Tanjungpandan. Kapasitas pelayanan transportasi udara berada di standar pelayanan dengan rata-rata tingkat isian penumpang dari tiap-tiap operator berkisar 60-80% untuk penerbangan hari biasa dan lebih 80% untuk penerbangan pada akhir minggu (Jumat-Minggu).

Pelabuhan Tanjung Pandan merupakan satu-satunya pelabuhan umum di Belitung yang memiliki kapasitas relatif memadai. Frekuensi pelayaran sekitar 26 kali dalam sebulan (Tanjung Pandan-Pangkalpinang PP) menggunakan moda kapal Express Bahari. Dengan kondisi tersebut dapat diasumsikan kapasitas maksimal Pelabuhan Tanjung Pandan dapat melayani 1.950 penumpang/ bulan atau 23.400 penumpang/tahun.

Sementara, kapasitas maksimal Pelabuhan Tanjung Ru dan Pelabuhan Tanjung Batu masing-masing dapat melayani sekitar 1.800 penumpang/bulan atau 21.600 penumpang/tahun. Bercermin dari kondisi tersebut, total kapasitas penumpang maksimal yang dapat terlayani di semua simpul transportasi saat ini sekitar 500.520 penumpang/tahun. Berdasarkan hitungan asumsi diatas, dapat diketahui perkiraan adanya GAP yang masih cukup tinggi untuk memenuhi target kunjungan wisatawan dari Kementerian Pariwisata di tahun

2019 sebesar 1.000.000 wisatawan domestik dan 500.000 wisatawan mancanegara.

KSPN Tanjung Kelayang merupakan bagian dari WPS 5 yaitu WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, yang saling terhubung oleh Jalan Nasional sepanjang 600,40 km. Panjang jalan nasional di Kabupaten Belitung yaitu 159,52 km yang terdiri dari 14 ruas jalan.

Backbone pertumbuhan WPS 5 ini disokong dengan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi di antaranya Kota Jambi dan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Muaro Jambi sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), KEK Tanjung Api-Api, Kawasan Industri Bangka berupa tambang timah, KTM Batu Betumpang, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan, dan Kota Manggar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

KEK Tanjung Kelayang yang saling berdekatan dengan kawasan KSPN Tanjung Kelayang. KSPN Tanjung Kelayang adalah bagian dari WPS 5 yang fokus pengembangannya berada di sektor kepariwisataan. Pusat pertumbuhan baru memiliki arti bahwa saat ini *backbone* perekonomian koridor tersebut belum berkembang dan berfungsi secara maksimal. Perkembangan kawasan ini memerlukan stimulan dan penguatan konektivitas untuk mengakselerasi kemajuan perekonomian pada setiap wilayah bagian WPS.



Gambar 3. Posisi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang Dalam WPS

Sementara itu, peran KSPN Tanjung Kelayang dalam pengembangan WPS Jambi - Palembang - Pangkal Pinang - Tanjung Pandan adalah sebagai salah satu titik perkembangan wilayah berbasis pariwisata yang diharapkan akan menjadi titik pertumbuhan utama yang memberikan trickle down effect pada wilayah sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, pengembangan infrastruktur di wilayah WPS 5 ini juga memiliki andil untuk mengakselerasi pengembangan kawasan Tanjung Kelayang sebagai pusat pertumbuhan baru.

Posisi KSPN Tanjung Kelayang yang berdekatan dengan Kota Tanjung Pandan (PKW) juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi Belitung, yang saat ini bertumpu pada hasil produksi di sektor pariwisata dan pertambangan.

Hal tersebut juga terkait keberadaan Bandara H.AS Hanandjoeddin yang menjadi simpul transportasi utama sebagai pintu gerbang wisatawan menuju pusat-pusat aktivitas pariwisata. Dengan kondisi demikian, Kota Tanjung Pandan sebagai PKW memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata di KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya.

KSPN Tanjung Kelayang dsd khususnya memiliki banyak daya tarik wisata yang juga merupakan daya tarik wisata utama di Belitung. Secara umum daya tarik wisata utama di Kawasan Tanjung Kelayang dan sekitarnya merupakan wisata alam dengan keunggulan hamparan batuan granit dan pulau-pulau dengan pasir putih dan air yang jernih serta lansekap yang indah. KSPN Tanjung Kelayang memiliki 3 daya tarik utama yaitu

Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Pandam, dan Batu Mentas Sanctuary. Kawasan strategis pariwisata tersebut berarti kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Klaster 1 Klaster 1 (Sujuk)

Klaster pertama merupakan kawasan Pantai Tanjung Kelayang dan sekitarnya, yang terdiri dari beberapa daya tarik seperti Pantai Mabai, Pantai Marina, Pantai Tanjung Tinggi, Desa Wisata Tanjung Binga, Masjid Tua Sujuk, Kelenteng China, dan gugusan

pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Tanjung Kelayang. Pemilihan klaster ini didasarkan pada dominasi karakteristik daya tarik wisatanya, arahan pengembangan per wilayahan kawasan pariwisata dalam rencana induk pariwisata serta jarak yang saling berdekatan antara daya tarik satu dengan yang lain.

Klaster 2 (Kawasan Perkotaan Tanjung Pandan)

Daya tarik wisata yang tersebar di kawasan perkotaan Tanjung Pandan merupakan bagian dari klaster dua. Pertimbangan yang sama seperti sebelumnya dalam menentukan klaster ini, yaitu karakteristik daya tarik pembentuk serta kedekatan jarak yang saling berdekatan antara daya tarik satu dengan yang lain. Klaster ini juga memiliki jarak paling dekat dengan entry point Bandara H.AS Hanandjoeddin dan Pelabuhan Tanjung Pandan.

Klaster 3 (Kawasan Selat Nasik dan Membalong)

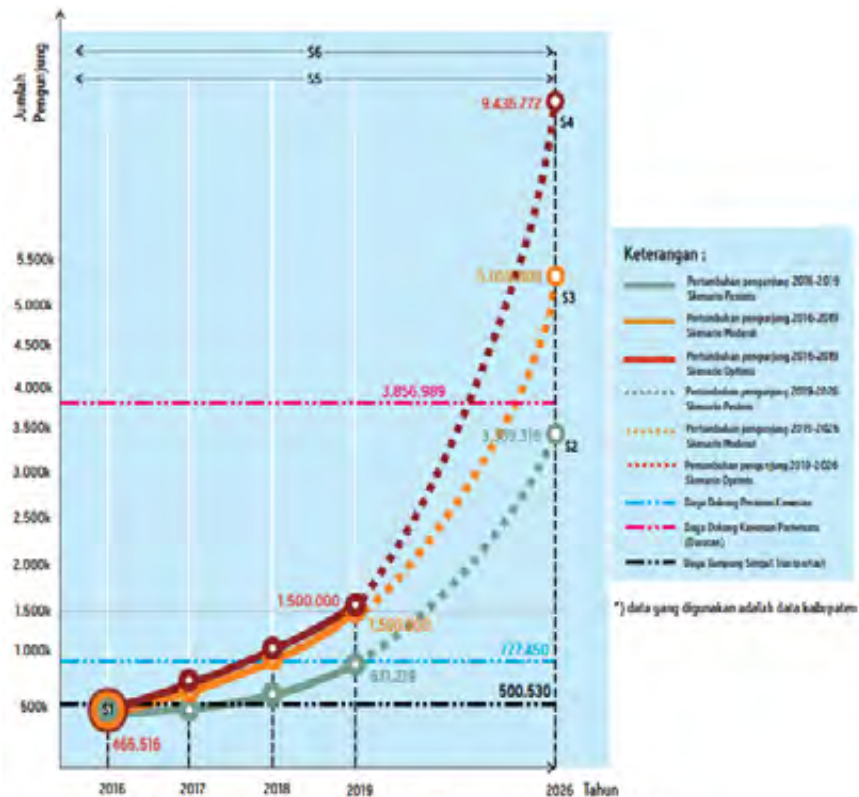
Klaster ketiga terdiri dari destinasi di kawasan Pulau Mandanau dan sekitarnya, di Kecamatan Selat Nasik dan di sekitar kawasan Membalong. Daya tarik yang menjadi bagian di kawasan Pulau Mandanau adalah Pantai Pasir Panjang, Mercusuar Tanjung Lancur, dan Pulau Leebong. Sedangkan daya tarik wisata di



Gambar 4. Daya Tarik Wisata Utama di KSPN Tanjung Kelayang dsd



Gambar 5. Klasterisasi Destinasi di KSPN Tanjung Kelayang dsk



Gambar 6. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di KSPN Tanjung Kelayang terhadap daya Tampung

kawasan Membalong, yang termasuk dalam klaster ketiga adalah Pantai Penyabong, Pantai Arumdalu, serta Pulau Seliu. Kedua kawasan pariwisata ini memiliki jarak terjauh dengan kawasan perkotaan Tanjung Pandan sebagai pusat pelayanan primer maupun bandara dan pelabuhan.

Saat ini, sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah pusat, tingkat kunjungan wisatawan Tanjung Kelayang ditargetkan untuk mencapai 500 ribu wisatawan mancanegara dan 1 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Target yang besar ini membutuhkan perhatian dan sinergi antar berbagai pihak di daerah maupun dari pusat.

Apabila dibandingkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan statistik Kabupaten Belitang, total kunjungan dari tahun 2011-2015, baru akumulatif 778 ribu jiwa, dimana 10 ribu-nya adalah wisatawan mancanegara. Tentu saja periode tersebut masih sangat jauh dibandingkan

Pengembangan Infratsrktur didasarkan pada laju pertumbuhan pengunjngnya, dapat dikategorikan menjadi beberapa poin pengembangan, yaitu :

- S1** yaitu kondisi awal jika KSPN Tanjung Kelayang hanya dikembangkan berdasarkan SPM yang berlaku. Tidak dikenai percepatan Infrastruktur
- S2** skenario pesimis, dengan proses ini maka pada 2019 Tanjung Kelayang dapat mencapai 631.219 pengunjng
- S3** skenario moderat, merupakan median antara skenario optimis dan pesimis, di tahun 2019 Tanjung Kelayang dapat mencapai angka 1.500.000 kunjungan wisatawan
- S4** skenario optimis, dengan skenario ini maka pada 2019 kunjungan wisatawan Tanjung Kelayang akan mencapai 1.500.000
- S5** Pembangunan infrastruktur sebagai atraksi wisata itu sendiri
- S6** Green Tourism Development

Ultimate Goal Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang “Geotourism and Marine Recreation Destination”

Ultimate adalah kondisi kawasan yang ingin dituju melalui pemograman infrastruktur berbasis pendekatan wilayah dalam jangka waktu 10 tahun. Penetapan ultimate goal pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Kelayang memper timbangkan beberapa kebijakan pembangunan nasional baik di sektor infrastruktur maupun kepariwisataan, yaitu:

Kawasan Tanjung Kelayang dikembangkan dalam kerangka Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Jambi - Palembang - Pangkal Pinang - Tanjung Pandan maka ultimate kawasan ini harus selaras dengan ultimate pengembangan WPS tersebut. Namun sayangnya pada saat pekerjaan ini berlangsung, dokumen rencana pembangunan WPS masih dalam tahap penyusunan. Diharapkan ultimate kawasan pariwisata Tanjung Kelayang ini dapat mewarnai dan melengkapi rencana pembangunan WPS.

Secara khusus, pembangunan infrastruktur di kawasan ini ditujukan juga untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan nasional yang telah menetapkan Tanjung Kelayang sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dari 10 destinasi wisata prioritas nasional serta adanya kebijakan ekonomi sebagai KEK Tanjung Kelayang

Selain itu, untuk mendorong sinergi dengan pembangunan daerah secara umum, maka penetapan ultimate sebaiknya mengacu kepada visi-visi pembangunan di daerah baik di sektor tata ruang maupun sektor kepariwisataan, yaitu:

Visi Pemerintah Kabupaten Berdasarkan RIPPAP Kabupaten Belitung 2015-2025: Visi yang dikembangkan adalah Kabupaten Belitung sebagai Destinasi Geowisata Alam dan Budaya yang berdaya saing Global, Beretika, dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Visi Pemerintah Kabupaten Berdasarkan RTRW Kabupaten Belitung 2014-2034: Visi yang dikembangkan adalah Kabupaten



Gambar 7. Konektivitas DTW pada Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang

Belitung sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan yang berbasis pada wisata alam dan wisata budaya

Visi Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Master Plan Tanjung Kelayang: Visi yang dikembangkan adalah Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Pendukung Wisata dengan fokus pada penyediaan fasilitas akomodasi bertaraf Internasional



Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang

Sumber: Istimewa

Berdasarkan rujukan kepada kebijakan dan mempertimbangkan kondisi penting tersebut, maka *ultimate goal* pengembangan pariwisata Tanjung Kelayang yang diusulkan adalah mewujudkan kawasan Tanjung Kelayang sebagai "Destinasi Geowisata dan

Rekreasi Pantai (Geotourism and Marine Recreation Destination)" Prinsip-prinsip dalam mewujudkan *ultimate goal* tersebut, meliputi:



•Meningkatkan konektivitas antara DTW dengan meningkatkan distribusi orang untuk memecah penumpukan orang di daya tarik utama



Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan atraktif serta mudah diakses oleh komunitas lokal maupun masyarakat bisnis



Pembangunan diutamakan untuk meningkatkan jejaring dan konektivitas, daripada dimensi atau ukuran



Diarahkan tidak hanya di DTW tetapi juga di lingkungan masyarakat



Sejauh memungkinkan infrastruktur komunal



Lingkup DTW kecil dan menyebar, sehingga mobilitas wisatawan perlu ditingkatkan agar tidak menumpuk di satu tempat.



Keterbatasan lahan di DTW sehingga pembangunan fasilitas diarahkan di kawasan perkotaan



Mercusuar, fasilitas infrastruktur pulau

Sumber: Istimewa

Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Tanjung Kelayang

STRATEGI 1: Penciptaan Value Creation Terhadap Potensi Wisata

- Pengembangan Pusat Edukasi dan Konservasi Geologi sebagai Diferensiasi Produk Wisata

STRATEGI 2: Peningkatan Konektivitas kawasan

- Membangun konektivitas antara bandara HAS. Hanandjoeddin – Kluster Perkotaan Tanjung Pandan – Kluster Sijuk (Tanjung Kelayang- Tanjung Tinggi)

STRATEGI 3: Pengembangan Kawasan Inkubasi

- Penerapan pendekatan Triple Helix dalam pengembangan kawasan Inkubasi Tanjung Kelayang dsk

STRATEGI 4: Penguatan Institusi Bisnis Kawasan Pariwisata

- Kontribusi aktif peran swasta dengan masyarakat mendukung terwujudnya pembangunan infrastuktur

STRATEGI 5: pengembangan Infrastuktur yang memenuhi Kebutuhan & menarik Wisatawan

- Penyediaan Infrastuktur sebagai pelayanan dan atraksi wisata itu sendiri

STRATEGI 6: Penyediaan Infrastuktur PUPR & Non PUPR bagi penduduk lokal

- Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda

STRATEGI 7: Optimalisasi pemanfaatan Infrastuktur oleh Masyarakat

- Pembangunan Infrastuktur Berbasis masyarakat

STRATEGI 8: keberlanjutan Lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau kecil

- Mitigasi resiko pembangunan infrastuktur

RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Tanjung Kelayang



Untuk mewujudkan visi pengembangan berdasarkan *ultimate goals*, strategi pengembangan kawasan, serta skenario pengembangan yang dibangun sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, disusun suatu rencana strategis infrastruktur yang menjadi dasar pemrograman infrastruktur PUPR dan non-PUPR pada kawasan pariwisata pantai ini untuk jangka waktu 10 tahun ke depan (PJM III 2017- 2019 dan PJM IV 2020-2025).

Adapun rencana strategis infrastruktur berisi rencana dan program pengembangan kawasan di sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan Rakyat, dan Non-PUPR (Perhubungan, Pariwisata, ESDM, Kominfo, Kelautan dan Perikanan). Rencana strategis infrastruktur meliputi rencana dalam skala makro, meso dan mikro.

Dalam skala makro, rencana strategis infrastruktur ditujukan untuk membangun konektivitas dan meningkatkan

aksesibilitas regional kawasan pariwisata pantai, umumnya dari strategic hub terdekat. Program infrastruktur pada skala ini fokus pada upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas simpul dan jaringan transportasi.

Dalam skala meso, rencana strategis infrastruktur ditujukan untuk membangun konektivitas antardestinas pariwisata yang terletak tersebar di seluruh kawasan, sehingga terwujud suatu paket wisata yang terintegrasi antara satu destinasi dengan destinasi lainnya.

Sedangkan dalam skala mikro, rencana strategis infrastruktur ditujukan untuk menata kluster-kluster destinasi pariwisata dalam skala detail (lokal), untuk meningkatkan nilai dan daya tarik kawasan (*value creation*), serta membangun infrastruktur pendukung pariwisata dalam skala manusia (*people scale infrastructure*). (Alis/Farhan)

Pembangunan Infrastruktur Didorong untuk Mengontrol Kunjungan Wisatawan



Gunung Bromo di Jawa Timur

Sumber: Istimewa

*K*eberadaan infrastruktur yang memadai memiliki peran strategis pada kawasan pariwisata dalam mengontrol jumlah kunjungan wisatawan. Meningkatnya kunjungan wisatawan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata dan sekitarnya.

Kawasan pariwisata Bromo–Tengger-Semeru (BTS) di Jawa Timur pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditetapkan masuk dalam 10+2 Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN). Kawasan pariwisata berstatus prioritas nasional untuk didukung seluruh sektor dalam pengembangannya.

Kawasan pariwisata BTS bersama 11 kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan KSPN, antara lain BTS di Jawa Timur, Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Pulau Morotai di Maluku Utara, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandeh di Sumatera Barat dan Toraja di Sulawesi Selatan.

Demi mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di BTS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melakukan penyusunan konsep pengembangan kawasan atau *Master Plan* dan *Developmen Plan* (MPDP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti memaparkan, konsep pengembangan infrastruktur

kawasan pariwisata difokuskan pada berbagai aspek. Artinya, pembangunan infrastruktur tak hanya untuk mendorong sentra ekonomi unggulan saja.

“Pembangunan infrastrukturnya juga didorong untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan yang ingin dikembangkan,” terang Lana.

BPIW telah menyusun MPDP yang meliputi rencana jalan akses antarpusat kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung kawasan, dan penyiapan rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, serta prasarana/ sarana sektor lainnya dalam rangka pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor pariwisata

Saat ini, lanjutnya, BPIW telah menyusun MPDP yang meliputi rencana jalan akses antarpusat kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung kawasan, dan penyiapan rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, serta prasarana/sarana sektor lainnya dalam rangka pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor pariwisata.

Menurutnya, rencana pengembangan BTS tersebut diharapkan menjadi arahan

pembangunan bagi seluruh Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR serta *stakeholder* lainnya.

Lana berharap, rencana pengembangan infrastruktur di lokasi destinasi BTS dan kawasan penopangnya akan menunjang tercapainya target kunjungan wisatawan. Peralunya, keberadaan infrastruktur PUPR akan semakin memberikan kemudahan dalam melakukan kunjungan ke destinasi BTS.

TARGET DAN STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR di KAWASAN PARIWISATA



Jumlah Turis Asing :

8,8 JUTA
Tahun 2013



Target Jumlah Turis Asing :

20 JUTA
Tahun 2019

STRATEGI



Penyiapan Master-plan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



Pengembangan Infrastruktur PUPR Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



Pengembangan Institusi, SDM, dan UKM Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Laporan Khusus

“Termasuk mobilisasi logistik yang pada akhirnya akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, KSPN BTS di Jawa Timur terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Kawasan tersebut memang memiliki nilai yang strategis untuk pengembangan di bidang pariwisata.

“Posisi strategis tersebut sebagai peluang dan potensi pasar, sehingga kawasan tersebut layak didukung oleh berbagai rencana pengembangan infrastruktur dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata,” papar Brawijaya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan

sanitasi dan air bersih bagi penduduk sekitar serta wisatawan antara lain, ada rencana pengembangan di Kabupaten Pasuruan, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Purwodari, pembangunan 3 unit SPAM IKK Tutur, pembangunan 1 unit SPAM IKK Tosari, pembangunan 4 unit SPAM

KSPN BTS di Jawa Timur terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Kawasan tersebut memang memiliki nilai yang strategis untuk pengembangan di bidang pariwisata.

IKK Prigen, pembangunan SPAM IKK Pandaan, pembangunan SPAM IKK Gempol, pembangunan 4 unit SPAM IKK Bangil, pembangunan SPAM IKK Rejoso, pembangunan SPAM IKK Winongan, pembangunan SPAM IKK Grati, pembangunan SPAM IKK Lekok,

pembangunan SPAM IKK Lumbang dan lainnya.

Untuk Kabupaten Probolinggo, ujar Brawijaya, pembangunan SPAM IKK Sumber, pembangunan SPAM IKK Leces, pembangunan SPAM IKK Tiris, pembangunan SPAM IKK Paiton, pembangunan SPAM IKK Pajarakan, pembangunan SPAM IKK Gending, pembangunan SPAM IKK Lumbang dan lainnya.

Adapun untuk Kabupaten Lumajang ada pembangunan SPAM IKK Pronojiwo, pembangunan SPAM IKK Candipuro, pembangunan SPAM IKK Pasirian, pembangunan SPAM IKK Sumpoko, pembangunan SPAM IKK Yosowilangun, pembangunan SPAM IKK Randuagung dan lainnya.

Selain itu di Kabupaten Malang, lanjutnya, ada pembangunan SPAM IKK Donomulyo, pembangunan SPAM IKK Tirtoyudo, pembangunan SPAM IKK Ampelgading, pembangunan SPAM IKK Poncokusumo, pembangunan SPAM IKK Wajak, pembangunan SPAM IKK Pakisaji, pembangunan SPAM IKK



Danau Ranu Kumbolo, Jawa Timur

Sumber: Istimewa



Tangga menuju Kawah Gunung Bromo

Sumber: Istimewa

Tumpang, pembangunan SPAM IKK Jabung, pembangunan SPAM IKK Singosari, pembangunan SPAM IKK Dau, pembangunan SPAM IKK Pujon dan lainnya.

"Ada juga rencana pembangunan toilet berstandar internasional dengan desain etnik lokal, serta berbagai penataan permukiman," papar Brawijaya.

Terkait untuk pemenuhan akses jalan yang handal untuk mendukung kegiatan pariwisata, lanjutnya, banyak sejumlah pengembangan jalan, mulai dari rekonstruksi jalan ruas Sukapura ke Ngadisari, rekonstruksi jalan ruas Ngadisari ke Cemorolawang, rekonstruksi jalan ruas Cemorolawang ke Gunung Bromo, rekonstruksi jalan ruas Malang ke Tumpang, rekonstruksi jalan ruas Tumpang ke Jemplang, rekonstruksi jalan ruas Jemplang ke Gunung Bromo, rekonstruksi jalan ruas

Tumpang ke Ranu Pani. "Kemudian, rekonstruksi jalan ruas Lumajang ke Senduro, rekonstruksi jalan ruas Senduro ke Ranu Pani," papar Brawijaya.

Lebih lanjut, Brawijaya mengatakan, BPIW Kementerian PUPR juga mendorong beragam pengembangan

BPIW Kementerian PUPR juga mendorong beragam pengembangan Jalan Provinsi yang mengarah ke destinasi KSPN BTS yang belum memadai.

Jalan Provinsi yang mengarah ke destinasi KSPN BTS yang belum memadai.

Mulai dari perlunya rekonstruksi Jalan KH Ahmad Dahlan-Pohjentrek (Pasuruan), rekonstruksi Jalan Pandaan-

Tretes, rekonstruksi Jalan Bts Kota Pasuruan-Kejayan, rekonstruksi Jalan Kejayan-Tosari.

"Termasuk rekonstruksi Jalan Kejayan-Purwosari, rekonstruksi Jalan Purwodadi-Nongkojajar, rekonstruksi Jalan Malang-Bts. Kota Batu (Sengkaling), rekonstruksi Jalan Malang-Turen, rekonstruksi Jalan Karanglo-Bts. Kota Batu, rekonstruksi Jalan Bts. Kota Lumajang - Bts. Kab. Jember," terangnya.

Untuk memberi arahan kepada seluruh *stakeholder* dalam mendukung percepatan pengembangan KSPN BTS, ungkap Brawijaya, BPIW Kementerian PUPR telah mendokumentasikannya dengan menjadikan buku "KSPN Bromo-Tengger-Semeru: Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Kawasan Strategis Pariwisata Pegunungan dan Budaya." (**ris/infoBPIW**)

SDM Aparatur Berkualitas

Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024



Hasna Widiastuti, ST, M.Eng. Sc

Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW Kementerian PUPR

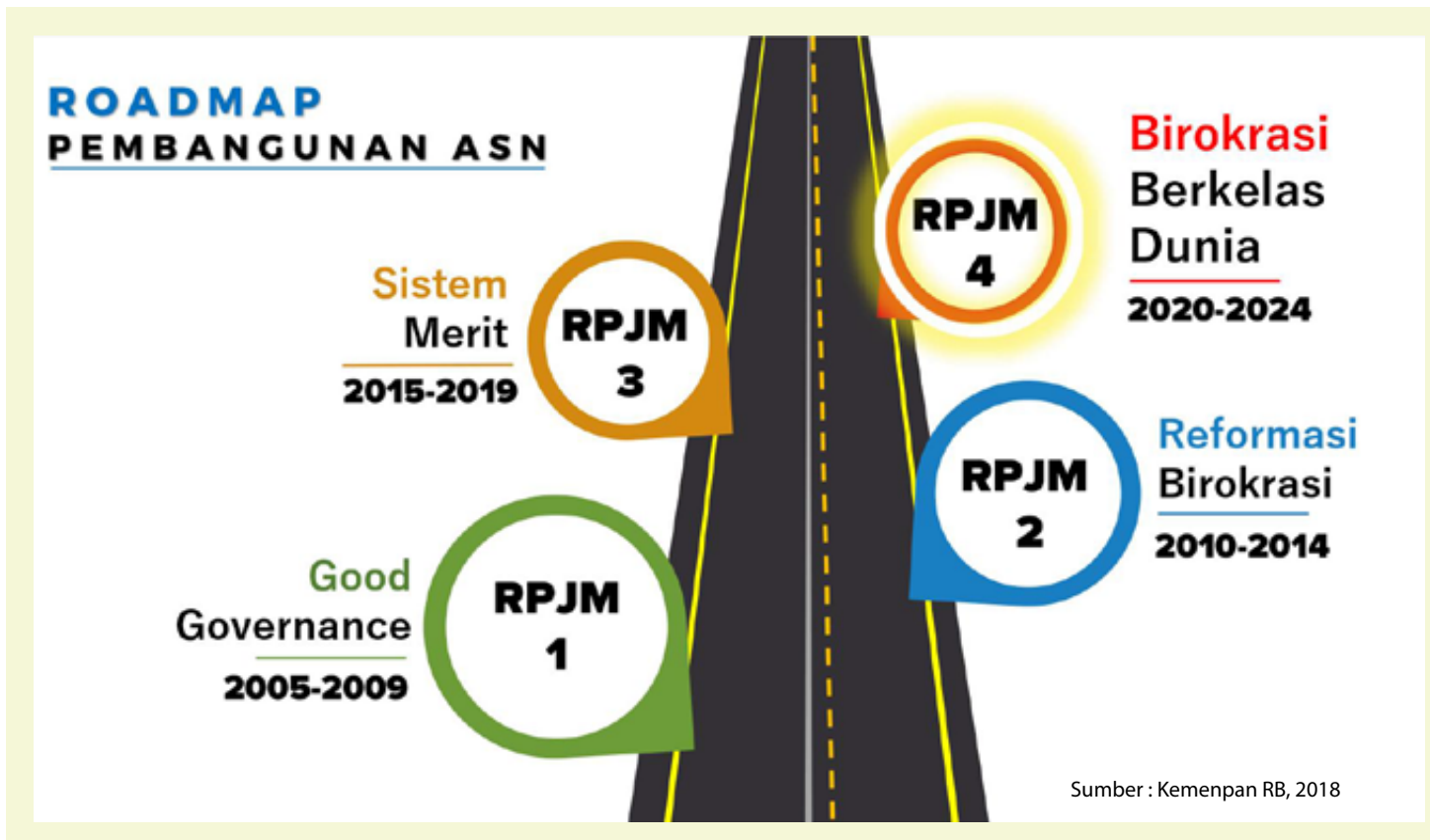
Presidential Lecture yang diadakan beberapa waktu yang lalu, untuk menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seleksi tahun 2017. Kegiatan tersebut mengangkat tema Birokrasi Kelas Dunia 2024. Dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur memberikan ciri-ciri birokrasi kelas dunia yaitu, pemerintah memanfaatkan data secara optimal, pemerintahan menggunakan teknologi informasi serta memiliki SDM yang berkualitas.

Semangat untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi

dan menciptakan *Good Governance* di Indonesia, didorong dengan adanya kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia mendapatkan landasan yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2021-2025.

Selanjutnya ditetapkan juga landasan operasional Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

**tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi*



Tahun 2015-2019. Dalam Reformasi Birokrasi ini yang cukup penting adalah diidentifikasinya delapan area perubahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Dari kedelapan area perubahan tersebut, maka disusun program Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Monitoring dan Evaluasi.

Artikel ini mengangkat salah satu aspek yang penting untuk mencapai birokrasi yang lebih baik yaitu mengenai Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Bila dicermati permasalahan mengenai SDM Aparatur ini memang tidak hanya terkait kualitas SDM namun juga manajemennya, di mana landasan peraturan yang lama (Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999) mengatur mengenai manajemen SDM namun lebih bersifat administratif.

Setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), arah kebijakan penataan manajemen SDM Aparatur ini menjadi lebih komprehensif; manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Dengan sistem merit ini diharapkan profil ASN di masa mendatang akan lebih berkualitas dan profesional. Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019,

Setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), arah kebijakan penataan manajemen SDM Aparatur ini menjadi lebih komprehensif; manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Dengan sistem merit ini diharapkan profil ASN di masa mendatang akan lebih berkualitas dan profesional.

tahun depan adalah tahun terakhir Sistem Merit ini harus sudah dilaksanakan. Sedangkan pada RPJM selanjutnya yaitu 2020-2024, target pembangunan ASN adalah Birokrasi Berkelas Dunia.

Gambaran Pegawai Negeri di Negara Maju

Untuk dapat memberikan gambaran manajemen pegawai negeri di negara lain berikut contoh gambaran pegawai negeri di Jepang dan Perancis yang dikenal mempunyai sistem birokrasi yang baik serta Singapura. Beberapa hal yang penting misalnya tentang seleksi pegawai, pemberian kesejahteraan, dan pengembangan pegawai.

Untuk menyaring calon pegawai yang kompeten, Pemerintah Jepang mengadakan seleksi yang sangat ketat dan membaginya dalam beberapa kelompok. Kelompok *high-*

Opini

flyers bureaucrats diproyeksikan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Pemerintah memberikan gaji yang menarik yang tidak kalah dengan pegawai kelas menengah di sektor swasta. Pendidikan dan latihan spesifik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan baik di dalam maupun di luar Jepang. *Local Autonomy College* misalnya adalah salah satu institusi yang dipergunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pegawainya.

Sementara di Prancis dikenal dengan lembaga *Ecole National d'administration* (ENA) yang telah berhasil mencetak elite birokrat di Prancis. Sistem pendidikan di ENA dimulai dari proses rekrutmen yang menyeleksi di antara pegawai negeri ataupun lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Prancis. Tujuan utama ENA yaitu menghasilkan lulusan yang siap pakai sehingga kurikulum yang diberikan mempunyai ciri *applied-training oriented* dan berwawasan nasional maupun global.

Singapura menerapkan kebijakan meritokrasi dalam pengelolaan pegawai negeri termasuk dalam seleksi dan penempatan. Selain itu dalam penilaian kinerja juga menerapkan keterbukaan dan obyektivitas, *reward* dan *recognition* berdasarkan *performance*. Pegawai negeri di

Singapura juga mendapat pembinaan secara berkala untuk peningkatan kapasitas, baik mengenai kapasitas strategis dalam pemerintahan, kepemimpinan, administrasi, maupun manajemen publik.

Bagaimana manajemen PNS di Indonesia?

Bila membandingkan manajemen PNS di negara lain yang telah menekankan pada kompetensi, *reward* dan kinerja, bagaimana Indonesia?. Sesuai dengan kebijakan baru dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

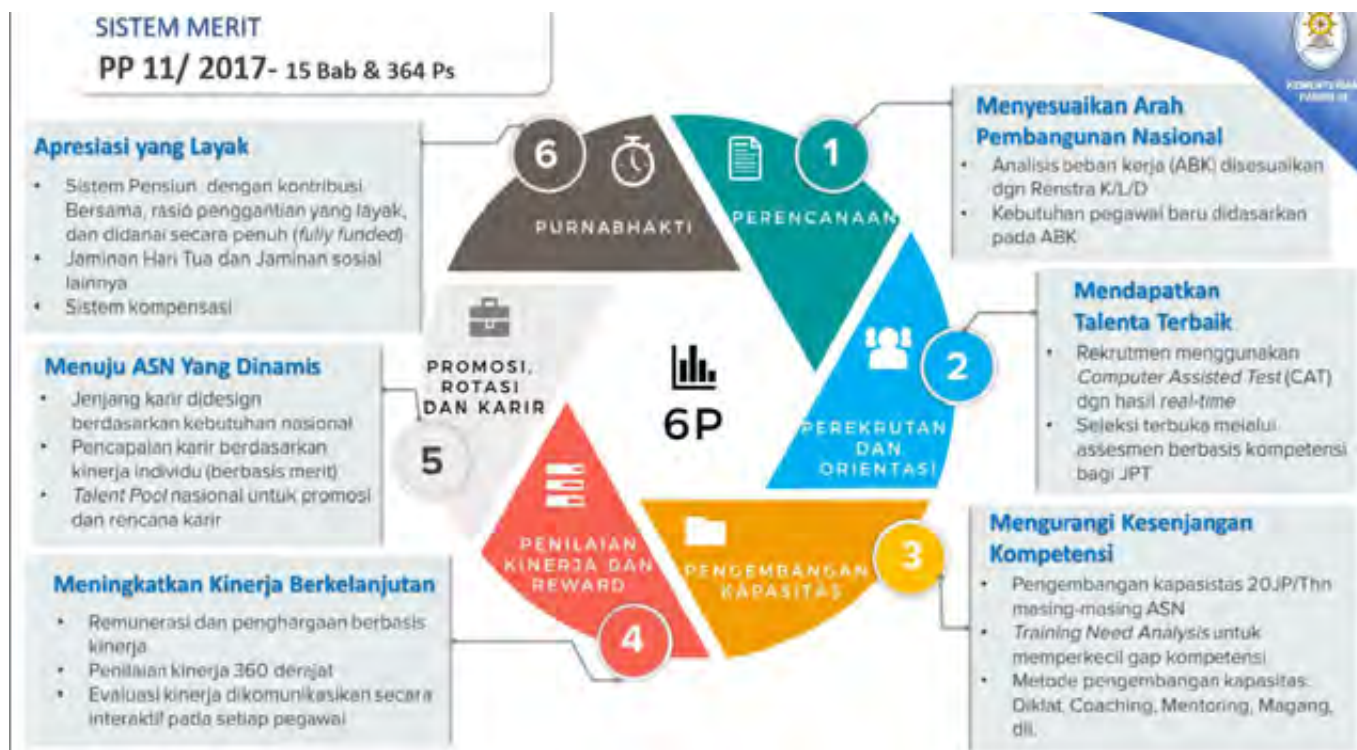
Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Untuk mewujudkannya, pengelolaan ASN (dalam UU ini seluruh PNS dan pegawai pemerintah lain yang bekerja pada instansi pemerintah disebut sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN) dilakukan dengan sistem Merit. Setelah ditetapkannya UU ini telah disiapkan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (R-PP) yang mendukung walaupun baru satu PP

Sesuai dengan kebijakan baru dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.



Sumber: Kemen PAN RB



yang telah ditetapkan yaitu PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

PP ini mengatur lebih menyeluruh mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan penggajian dan tunjangan. Kemudian diatur juga mengenai penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua serta perlindungan. Sementara R-PP lainnya sedang disiapkan, seperti R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain serta R-PP tentang Penilaian Kinerja.

Pelaksanaan Sistem Merit

Prinsip meritifikasi digunakan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki birokrasi, di mana penghargaan diberikan kepada pegawai disesuaikan dengan keahlian/jabatannya atau prestasinya. Dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Sistem Merit didefinisikan kebijakan Manajemen ASN yang diterapkan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang baik secara politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Sistem Merit ini diwujudkan melalui beberapa upaya mulai dari Proses seleksi/promosi secara adil dan kompetitif, Penerapan prinsip *fairness*, Pemberian gaji, *reward*, and *punishment* berbasis pada kinerja, Penerapan Standar integritas dan perilaku pada Yanlik (Pelayanan Publik), Manajemen SDM secara efektif dan efisien sampai pada upaya perlindungan pegawai dari intervensi politik dan dari

tindakan pejabat/penguasa yang semena-mena. Di tahun 2017, Pemerintah telah melakukan proses seleksi CPNS 2017 yang dilaksanakan secara nasional, pendaftaran secara online dan tes menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan hasil secara *real time*.

Kualifikasi, Kompetensi dan Pengembangan PNS

Kualifikasi yang cukup dalam menempati suatu jenjang jabatan menjadi sangat penting bagi PNS agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagai acuan, disusun standar kualifikasi untuk setiap jabatan dan dalam implementasinya perlu konsistensi pengambil kebijakan karena kualifikasi yang tepat akan mendukung profesionalisme pegawai di bidangnya. Setiap jabatan juga mempunyai standar kompetensi (kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural) dan setiap PNS harus diberikan uji kompetensi sebagai dasar rencana pengembangan kompetensinya.

Pengembangan kompetensi PNS sudah diamanatkan dalam PP No. 11 Tahun 2017 pasal 203 ayat 4 bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Pengembangan ini tidak mutlak dilakukan secara klasikal namun perlu inovasi bagaimana agar PNS dapat mengembangkan kompetensinya. Setiap PNS berhak mendapatkan kesempatan ini sesuai dengan penilaian kompetensi dan kerjanya.

Di samping itu, dengan dasar kualifikasi dan kompetensi ini, PNS juga akan mempunyai pengembangan karier sesuai dengan prinsip sistem merit. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier, meningkatkan

kompetensi dan kinerja PNS yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

Penerapan Penilaian Kinerja dalam Manajemen PNS

Dalam penerapan sistem merit, yang tidak kalah penting adalah penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja ini mempunyai berujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja individu harus terkait dengan penilaian kinerja organisasi.

Penilaian ini harus dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penerapan *reward* dan *punishment* sangat penting untuk dapat mendorong pegawai berkinerja lebih baik.

Tantangan Manajemen ASN dalam Persiapan Menuju Birokrasi Kelas Dunia

Meskipun peraturan perundangan yang ada saat ini sudah sangat mendukung implementasi sistem merit dalam manajemen PNS, namun dalam implementasinya masih dijumpai kendala yang tidak sedikit. Hal ini antara lain karena belum lengkapnya landasan peraturan yang lebih operasional. Pertama, mengenai kelompok jabatan (administrasi, fungsional, jabatan tinggi) dan penghapusan golongan belum efektif dilaksanakan.

Komposisi jabatan fungsional umum masih cukup tinggi (38% dari jumlah PNS nasional). Kedua, mengenai kinerja dan penerapan penilaian kinerja yang ideal belum dapat

diterapkan. Landasan operasional yang mendukung yaitu R-PP mengenai penilaian kinerja dan gaji belum ditetapkan. Ketiga, mengenai pengembangan karier juga masih terkendala salah satunya karena belum adanya acuan pola karier nasional, pola karier baru disiapkan di tingkat instansi. Keempat, adalah belum adanya pengaturan mengenai Non PNS dan konsep Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara pelaksanaan sistem merit yang belum seideal yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,

manajemen PNS sudah dihadapkan dengan tantangan era baru dalam industri. Revolusi industri telah memasuki generasi keempat (Era Industri 4.0) dimana dunia digital dan internet yang telah dijalani saat ini akan lebih berkembang dan banyak menekankan pada *artificial intelligence*.

Dalam dunia industri dan tenaga kerja, telah diprediksi banyak

pekerjaan yang dikerjakan manusia akan tergantikan dengan mesin/robot. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah dalam menyiapkan SDM terutama di dunia pendidikan dan industri.

Birokrasi harus lebih siap termasuk ASN, untuk menghadapi perkembangan seperti jaman, sehingga penguasaan digital menjadi kemampuan yang wajib. Dalam PP No. 11 Tahun 2017 telah mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, yaitu diamanatkan bahwa manajemen PNS dilakukan dengan sistem informasi ASN yang berbasis teknologi.

Birokrasi harus lebih siap termasuk ASN, untuk menghadapi perkembangan seperti jaman, sehingga penguasaan digital menjadi kemampuan yang wajib. Dalam PP No. 11 Tahun 2017 telah mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, yaitu diamanatkan bahwa manajemen PNS dilakukan dengan sistem informasi ASN yang berbasis teknologi.





Ilustrasi PNS saat mengikuti upacara bendera

Sumber: Dok.BPIW

Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024

Di tengah upaya Pemerintah dalam hal ini lembaga/unit kerja yang berwenang terkait kepegawaian untuk terus memperbaiki manajemen ASN, sebagai individu, ASN perlu memberikan perhatian pada beberapa hal berikut sehingga dapat mempersiapkan diri mendukung kebijakan Pemerintah mengenai Birokrasi Kelas Dunia 2020-2024:

1. Setiap ASN harus mempunyai mindset profil SMART ASN.

Perangkat regulasi dan kebijakan yang telah disiapkan tidak akan efektif dapat diimplementasikan bila setiap individu ASN tidak menanamkan pada dirinya mengenai profil SMART yang harus dituju (integritas, nasionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, *hospitality*/pelayanan, *networking*/jaringan, *entrepreneurship*/kewirausahaan).

2. Kompetensi sangat penting dan ini harus disadari oleh setiap ASN untuk berinisiatif meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.

Setiap ASN mempunyai kewajiban melakukan pembinaan terhadap bawahannya dan untuk menuju birokrasi kelas dunia ini kemampuan mentoring, counseling dan coaching harus terus ditingkatkan.

Di era informasi saat ini, pengembangan kompetensi tidak hanya dapat diperoleh melalui metode klasikal diklat tapi bisa dengan media online maupun aktif dalam berbagai asosiasi keahlian.

3. Wawasan yang terbuka terhadap segala perkembangan dan isu strategis baik nasional maupun global.

Perkembangan nasional dan global yang dinamis perlu selalu diikuti oleh ASN, misalnya saat ini mengenai era industri.

4. Untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai bentuk estafet dari generasi sebelumnya dan untuk mendukung peningkatan kinerja, sangat penting ditekankan bahwa setiap ASN adalah *mentor* dan *coach* bagi bawahannya.

Setiap ASN mempunyai kewajiban melakukan pembinaan terhadap bawahannya dan untuk menuju birokrasi kelas dunia ini kemampuan *mentoring*, *counseling* dan *coaching* harus terus ditingkatkan.

Referensi:

Paparan Kemenpan RB 'Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024', 2018 catatanpamong.blogspot.com>2013/11

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025

(UU NO. 17 TAHUN 2007)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019 akan berakhir 2019 mendatang. Selanjutnya, pembangunan nasional menuju RPJMN IV yakni 2020-2024. Sehubungan dengan hal itu BPIW juga sedang menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Teknokratik.

Renstra yang akan dibuat tentu saja sejalan dengan tujuan RPJMN IV yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN I
(2005-2009)



Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJMN II
(2010-2014)



Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian.

RPJMN IV (2020-2024)

RPJMN III (2015-2019)



Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.



Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Pesona Wisata Terfavorit Di Lampung

Salah satu destinasi liburan yang paling menarik di Indonesia adalah provinsi Lampung. Bandar Lampung merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Secara geografis Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km, sebelah barat laut Jakarta yang memiliki luas wilayah daratan 169, 21 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dan berada di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 6 yang meliputi Merak –Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api.

Provinsi Lampung yang berada di bagian selatan Pulau Sumatera ini mempunyai obyek wisata yang sangat beragam. Wisata alam dengan panorama memukau menjadi obyek wisata yang dominan di wilayah ini. Beberapa obyek wisata di provinsi ini yang dapat dikunjungi seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan juga Menara Siger.

1. Pulau Pahawang

Pulau Pahawang merupakan salah satu taman laut yang terkenal dengan keindahannya dan merupakan surga wisata yang tersembunyi di Lampung. Pulau yang memiliki luas 1.084 hektar ini terbagi menjadi 2 pulau yaitu pulau pahawang kecil dan pulau pahawang besar. Pulau Pahawang

Pahawang Kecil letaknya tidak jauh dari pulau pahawang besar. Luas Pahawang kecil kurang lebih 13 hektar.

Pulau ini dikelola dan dimiliki secara privat oleh warga negara asing yang dikenal penduduk dengan sebutan Mr. Joe. Karena pulau pahawang kecil ini bersifat *private*, maka tidak bisa bebas dikunjungi oleh para wisatawan.

Di pulau ini juga dapat dinikmati suasana alam sekitarnya yang indah. Bagi anda yang senang *snorkeling* atau berenang, masih dapat dinikmati di pulau ini, kita dapat menikmati suasana khas pantai yang segar, sunrise dan sunset dan juga melihat flora dan fauna khas hutan mangrove.

2. Teluk Kiluan

Sebuah desa yang terdapat di Lampung ini menyimpan sebuah surga tersembunyi yakni kawasan teluk yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang indah dan memanjakan mata. Jikalau anda pernah melakukan kunjungan ke Pantai Lovina di Pulau Dewara, maka lokasi wisata Lampung yang hampir sama yakni teluk kiluan ini kita dapat melihat kumpulan ikan

Provinsi Lampung yang berada di bagian selatan Pulau Sumatera ini mempunyai obyek wisata yang sangat beragam. Wisata alam dengan panorama memukau menjadi obyek wisata yang dominan di wilayah ini

Besar merupakan pulau tujuan utama bagi wisatawan yang akan berkunjung, pahawang besar ini memiliki luas kurang lebih 1000 hektar. Jika akan berpergian ke Pulau Pahawang ini, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dari kota Bandar Lampung yang kemudian dilanjutkan perjalanan naik perahu sampai tujuan akhir yakni Pulau Pahawang Besar. Untuk Pulau



Pulau Kelapa di Teluk Kiluan 3

Sumber: Istimewa

lumba-lumba yang amat lucu secara langsung di habitatnya. Banyak sekali destinasi wisata di pulau ini yang dapat dikunjungi seperti snorkeling, wisata batu candi, sampai menikmati pantai pasir putih.

Waktu terbaik untuk dapat menyaksikan lumba-lumba di teluk ini adalah bulan April sampai dengan September, Selain lumba-lumba dan keindahan alam yang menawan, ada hal lain yang menjadi daya tarik teluk, yaitu sejarah yang masih beredar di warga sekitar hingga saat ini. Konon katanya, di tengah pulau Kiluan, terdapat tumpukan batu yang dikeramatkan, yang dipercaya adalah makam milik Raden Arya Antawijaya atau Raden Mas Arya.

3. Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas merupakan taman yang sudah begitu terkenal dan identik dengan gajahnya, dan merupakan pusat ekosistem yang berada di hutan daratan rendah dan terdiri dari hutan rawa air tawar dengan padang rumput serta semak belukar dan hutan pantai. Taman yang didirikan pada tahun 1985 ini merupakan sekolah gajah yang pertama di nusantara.

Lokasi taman satwa liar ini terletak di ujung timur pulau Sumatera yang berada di pinggir pantai. Dulunya tempat ini mempunyai nama Pusat Latihan Gajah (PLG) dan selanjutnya diubah menjadi Pusat Konservasi Gajah (PKG) dengan harapan di tempat ini hewan gajah dapat dilatih, dijinakan, dan dilindungi. Tempat tersebut juga sebagai lokasi perkebangbiakan serta konservasi. Jika ingin berkunjung ke Taman Nasional ini, waktu yang ditempuh dalam perjalanan sekitar dua sampai tiga jam dengan jarak tempuh kurang lebih 112 km dari pusat kota Bandar Lampung.

4. Menara Siger

Menara ini adalah menara yang menjadi titik nol Sumatera di Jalan raya bumi sari natar gang bimo Ruko Orange. Menara ini merupakan salah satu simbol identitas di Ujung Tenggara Lampung yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sjahroedin Z.P pada 30 April 2008.

Menara Siger ini memiliki bentuk yang unik dengan sembilan kerucut berwarna kuning keemasan yang berderet memanjang. Bentuk ini mengadaptasi bentuk mahkota

pengantin wanita (siger) dalam adat lampung. Menurut Sjachroedin Menara Siger bukan monumen masa lalu, tetapi bangunan masa depan yang akan jadi fenomena masyarakat Lampung. (Indira)



Menara Siger

Sumber: Istimewa

Inilah 5 Rusun Terkenal yang Dioperasikan pada 2015-2018

Rumah susun (Rusun) merupakan bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan sistem pengelolaan yang menganut konsep kebersamaan. Untuk status Rusun sendiri, ada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) serta Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya. Kemudian, meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber

daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang.

Selain itu, memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan ketentuan, sehingga rumah susun harus memiliki syarat-syarat seperti rumah biasa yakni dapat menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman, menjadi wadah sosialisasi dan memberikan suasana nyaman dan harmonis bagi penghuninya.

Saat ini banyak rusun yang telah diresmikan operasionalnya oleh pemerintah di berbagai daerah. Berikut 5 Rusunawa terkenal yang beroperasi secara resmi dalam kurun waktu 2015-2018.

Rumah Susun Sewa Paspampres Grup C Lawang Gintung

Rusunawa yang diresmikan pada 10 Februari 2017 ini diperuntukkan memenuhi kebutuhan tempat tinggal anggota Paspampres. Dibangun secara bertahap pada tahun 2015 dan

2016 di lahan Kementerian Pertahanan, Rusunawa ini terdiri atas dua *tower* yang masing-masing memiliki 35 unit dan mampu menampung 70 kepala keluarga.

Rusunawa berlantai tiga ini telah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas seperti jalan lingkungan, serta saluran air. Selain itu, untuk *tower* yang dibangun pada 2016 telah dilengkapi fasilitas mebeulair seperti sofa dan meja tamu, meja dan kursi makan, tempat tidur, serti lemari pakaian.



Rusunawa Paspampres Grup C Lawang Gintung, Bogor

Sumber: Istimewa

Rusunawa Tembok Rejo

Rusunawa yang berlokasi di Desa Tembok Rejo, Kelurahan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur ini mulai dibangun tahun 2015 dan diresmikan pada 20 Maret 2018.

Rusunawa ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rusunawa bertipe 36 ini dibangun satu *twin block* (TB) setinggi lima lantai di atas lahan 15.000 meter persegi dan luas bangunan 3.904 meter persegi. Rusunawa ini terdiri dari 70 unit hunian dan ada enam unit Rusun khusus difabel.

Harga sewa yang direncanakan untuk rusunawa ini berada di angka Rp 225.000 hingga Rp 400.000. Perbedaan harga ini didasarkan pada lantai unit yang disewa.

Semakin tinggi lantainya maka akan semakin murah biaya sewanya. Sampai saat ini Pemkot Pasuruan masih mendata warga yang akan menempati hunian tersebut.



Rusunawa Tembok Rejo

Sumber: Istimewa



Rusunawa Mahasiswa UGM Bayat

Sumber: Istimewa

Rusunawa Mahasiswa Universitas Gajah Mada

Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan dua rusunawa untuk Mahasiswa UGM, yakni Rusunawa Mahasiswa UGM Sendowo yang berlokasi di Jalan Sendowo, Kabupaten Sleman, dan Rusunawa Mahasiswa UGM Bayat, Desa Bayat, Kabupaten Klaten. Rusunawa mahasiswa UGM Sendowo rampung di akhir tahun 2017. Sedangkan Rusunawa mahasiswa UGM Bayat rampung tahun 2016 dan diresmikan pada 17 Februari 2018.

Keberadaan Rusunawa Mahasiswa UGM Bayat sangat bermanfaat bagi mahasiswa Teknik Geologi. Hal ini disebabkan Rusunawa ini sering digunakan sebagai "rumah singgah" bagi mahasiswa Teknik Geologi yang akan melakukan studi lapangan geologi yang berlangsung dalam periode yang cukup lama.

Selain itu, Rusunawa UGM Bayat tidak hanya digunakan oleh mahasiswa UGM tetapi juga oleh mahasiswa kampus lainnya, bahkan sejumlah mahasiswa luar negeri yang melakukan studi lapangan geologi juga dapat tinggal di Rusunawa ini. Rusunawa tiga lantai ini memiliki 54 unit untuk umum dan dua unit untuk difabel dengan tipe 24 meter persegi dan telah dilengkapi tempat tidur bertingkat, meja belajar dan lemari pakaian.

Rusunawa Dandangan

Selain di Pasuruan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga membangun rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kediri, Jawa Timur, yaitu Rusunawa Dandangan. Dibangun secara bertahap mulai tahun 2011 sebanyak dua *twin blok* dan dilanjutkan dengan tahap kedua sebanyak tiga *twin blok*, Rusunawa ini diresmikan pada 29 Desember 2017 oleh Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar dan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Farida mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Rusunawa berkapasitas 954 unit diperuntukan bagi MBR Kota Kediri diantaranya dari Kelurahan Dandangan, Ngadirejo, Balowerti dan Semampir. Selanjutnya, Kelima *twin blok* tersebut sudah dihibahkan oleh Kementerian PUPR kepada Pemda Kota Kediri.

Rusunawa ini telah dilengkapi listrik, air bersih dan taman yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bercengkrama dan bersosialisasi, masjid, dan sarana pendidikan.



Rusunawa Dandangan, Kediri

Sumber: Istimewa

Rusunawa Khusus Lansia

Rusunawa lain yang diresmikan di tahun 2018 adalah Rusunawa khusus lansia yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Rusunawa khusus orang tua lanjut usia ini merupakan yang pertama dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain merupakan bagian dari program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, pembangunan Rusunawa Lansia ini bertujuan untuk memfasilitasi para lansia agar dapat beristirahat dengan layak dan bersosialisasi dengan lansia lain di masa tua.

Rusunawa khusus lansia ini akan menjadi percontohan untuk pembangunan rusunawa lansia berikutnya. Diharapkan program seperti ini dapat membantu yayasan yang mengurus lansia agar dapat memberikan tempat yang nyaman.

Fasilitas yang terdapat pada rusunawa khusus lansia ini tergolong sangat lengkap. Selain sudah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, sofa, meja tamu, kursi makan, dan meja makan, rusunawa ini juga dilengkapi dengan jalur landai untuk kursi roda (ramp) dan pegangan tangan di sepanjang

jalan (hand rail). Adanya lift serta fasilitas penunjang seperti prasarana, sarana dan utilitas.

Berlokasi di Jalan Karya Bhakti ini memiliki satu *tower* yang terdiri tiga lantai dengan tipe 24. Jumlah unit rusunawa tersebut sebanyak 90 hunian dengan dilengkapi ruang pengelola, ruang usaha, mushola, dan ruang serba guna. **(Syifa/sumber: <https://www.pu.go.id>)**



Rusunawa khusus Lansia, Cibubur

Sumber: Istimewa



TIPS MENGEMBALIKAN SEMANGAT KERJA SETELAH LIBUR PANJANG

Semua orang pasti sangat menyukai dan bahkan sangat menunggu masa liburan. Tidak heran, banyak orang yang menghabiskan masa liburannya dengan bersantai-santai pergi ketempat wisata atau bahkan pergi keluar negeri. Namun setelah liburan yang lama, timbul rasa malas untuk kembali bekerja.

Tentunya banyak orang pasti masih terlena dengan liburan dan ogah-ogahan saat tiba waktunya kembali bekerja. Lalu bagaimana caranya mengembalikan semangat kerja setelah libur panjang? Berikut tips yang dapat dilakukan agar dapat mengembalikan semangat kerja setelah libur panjang.

1. Memikirkan Kesenangan Dalam Bekerja

Dibanding dengan liburan, tentu saja bekerja adalah hal yang tidak menyenangkan, namun jika kamu menyukai pekerjaan kamu, pasti ada sisi senangnya dari pekerjaan kamu. Agar kamu bisa kembali bersemangat, pikirkanlah hal-hal menyenangkan itu.

Misalnya, kamu bisa pikirkan tentang bertemu dengan teman kerjamu yang sudah lama tak bertemu. Dengan memikirkan sisi positif dari pekerjaan kamu, maka akan semakin mudah bagi kamu untuk menumbuhkan semangat kerjamu yang sudah hampir sirna itu.

2. Temukan Motivasi Terbesarmu

Apa yang jadi motivasimu bekerja? Uang? Naik jabatan? Menghidupi keluarga? Mencukupi gaya hidup? Apa pun yang jadi motivasimu, perkuat lagi alasan itu. Ingatkan diri sendiri bahwa kamu membutuhkannya lebih dari apa pun. Prioritaskan alasan itu sebagai sumber semangat bekerjamu.

3. Buat Jadwal Kerja Hari Pertama

Memiliki kegiatan yang tertata rapi akan membuat kamu lebih bersemangat dalam bekerja. Buatlah jadwal pekerjaan yang akan kamu selesaikan mulai dari hari pertama hingga beberapa minggu ke depan.

Dengan begitu, kamu secara tidak langsung mulai memikirkan cara untuk menyelesaikannya dan secara tidak sengaja semangat kerjamu bisa kembali meningkat. Jika punya jadwal yang jelas, maka kamu juga memiliki tujuan kerja yang jelas dan hal itulah yang bisa memacu kamu untuk lebih bersemangat.

4. Datang Lebih Pagi

Setelah beberapa lama bermalas-malasan di rumah, kamu jadi terbiasa untuk terus malas dan bangun siang. Tapi sekarang adalah saatnya kamu bekerja, jadi tinggalkan kebiasaan itu. Caranya adalah dengan cara

memaksakan diri untuk bangun dan datang lebih pagi ke tempat kerjamu. Dengan begini, kamu punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaanmu yang sudah lama ditinggalkan sehingga kamu tidak keteteran saat mengerjakannya nanti.

5. Memulai Hari dengan 3M

Agar kembali semangat kerja setelah libur panjang, mulai hari dengan 3 M. 3 M yang dimaksud adalah *movement*, *mindful eating* dan *minimizing*. Artinya Anda dianjurkan untuk banyak bergerak, makan dengan benar, serta meminimalisir gangguan.

Saat pagi, mulailah hari dengan olahraga kemudian sarapan dengan makanan yang bergizi dan pelan-pelan. Hindari pula distraksi seperti musik, acara televisi, atau pertengkarangan agar Anda lebih fokus. **(Indira/dari berbagai sumber)**



Teknologi Saluran Irigasi Modular

Saluran Modular di Kadugenep, Serang, Banten

Sumber: Balitbang PUPR

Kebocoran dan kelongsoran tanggul merupakan masalah utama pada saluran irigasi. Umumnya masalah tersebut disebabkan oleh kerusakan *lining* saluran. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi layanan atau kualitas bahan yang kurang baik saat konstruksi.

Untuk itu, Kementerian PUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) terutama Balai Litbang Irigasi, Puslitbang Sumber Daya Air, telah menghasilkan teknologi yang disebut "Saluran irigasi Modular".

Teknologi tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan. Keunggulan lain adalah dapat menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. Penerapan teknologi tersebut juga dapat memperbaiki estetika.

Teknologi ini dapat digunakan di saluran irigasi primer hingga tersier untuk membagikan air ke persawahan atau lahan pertanian secara efektif dan efisien. Selain itu teknologi saluran irigasi modular dapat memecahkan permasalahan kebocoran dan

menghindari terjadinya longsornya tanggul saluran irigasi yang disebabkan oleh kerusakan *lining*, akibat dari terjadinya penurunan fungsi layanan atau kualitas bahan yang kurang baik saat konstruksi.

Teknologi tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan. Keunggulan lain adalah dapat menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. Penerapan teknologi tersebut juga dapat memperbaiki estetika. Teknologi saluran irigasi beton pracetak modular itu juga kuat dan biaya pemeliharannya lebih murah. Teknologi ini cocok diterapkan pada daerah irigasi baru maupun rehabilitasi jaringan irigasi.

Saluran irigasi modular dapat dilaksanakan apabila kondisi tanah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada dasarnya saluran irigasi modular tersebut harus aman terhadap stabilitas geser (*sliding*), stabilitas guling (*overtuning*), dan daya dukung tanah (*uplift*).

Nilai stabilitas tanah dianalisa sifat karakteristik setiap lapisan tanah yang didapatkan dari pengujian lapangan dan laboratorium, antara



Sumber: Balitbang PUPR

Proses pengangkatan modul dengan alat sederhana

Saluran modular dibuat menggunakan beton pracetak.

lain berat isi tanah, kohesi tanah, sudut geser dalam tanah, dan ketinggian muka air tanah (bila ada).

Saluran irigasi modular dibuat menggunakan beton pracetak yang dibentuk sebagai modul-modul yang menyusun satu penampang penuh saluran. Jenis modul meliputi modul sudut, lantai/dinding, sabuk atas, dan pondasi.

Desain masing-masing komponen modular dibuat tidak hanya dengan mempertimbangkan kriteria teknis namun juga mudah diterapkan oleh Petani Pemakai Air (P3A) dengan menggunakan alat sederhana.

Beton pracetak mulai banyak digunakan dalam pembangunan saluran irigasi setelah Dirjen Sumber Daya Air (SDA) mengeluarkan surat edaran No. 04/SE/D/2017 tentang Pedoman Penggunaan Beton Pracetak pada Saluran Irigasi. Melalui surat edaran ini, Ditjen SDA menganjurkan agar seluruh pelaksanaan *lining* saluran menggunakan beton pracetak sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan kualitas pekerjaannya baik serta seragam.

Teknologi saluran irigasi modular merupakan salah satu jenis beton pracetak yang dapat digunakan. Saluran irigasi modular proses pengerjaannya sederhana, mudah, dan dapat dilakukan secara partisipatif. Selain itu, saluran irigasi modular cukup kokoh karena memiliki sambungan yang kuat dan cukup kedap sehingga kehilangan air dapat diminimalisasi.

Mutu konstruksi saluran irigasi modular tercermin dari bahan yang digunakan. Spesifikasi bahan yang digunakan adalah beton K300 yang berdasarkan SNI 03-2847-2002 termasuk dalam mutu sedang. Spesifikasi mutu ini umum digunakan sebagai plat lantai jembatan, gelagar beton bertulang, diafragma, kerb betob pracetak, gorong-gorong beton bertulang, dan bangunan bawah jembatan.

Dengan spesifikasi ini, modul saluran mempunyai kekuatan yang cukup baik untuk mencegah keretakan pada saat mobilisasi dari *workshop* dan juga beban konstruksi. Spesifikasi ini sesuai juga dengan Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air (2017), di mana mutu beton pracetak yang dipersyaratkan adalah K300 apabila beton pracetak dibuat di *workshop* dan K250 apabila beton pracetak dibuat di lokasi pengerjaannya. Setiap modul dicetak di *workshop* sehingga keseragaman kualitas bahan dapat terjaga.

Penerapan teknologi ini telah dilakukan oleh Balai Litbang Irigasi dalam rangka uji coba penerapan dan mengukur beberapa parameter kinerja teknologi. Penerapan secara langsung dalam rehabilitasi jaringan telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Teknologi ini diterapkan di dua lokasi di Provinsi Banten, yakni Daerah Irigasi (DI) Kadugenep, Serang dan DI Cimajau, Pandeglang.

(Sumber: Hanhan Ahmad Sofiyuddin, Peneliti Balai Litbang Irigasi)

UPACARA BENDERA HARI KEBANGKITAN NASIONAL



Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin menjadi inspektur upacara didampingi eselon 1 lainnya



Ratusan peserta mengikuti rangkaian upacara dengan hikmat



Pengibaran Sang Saka Merah Putih



Barisan BPIW saat mengikuti upacara bendera Hari Kebangkitan Nasional



Koprs musik (Korsik) saat membawakan instrumen lagu Indonesia Raya

Jajaran pimpinan dan staf Kementerian PUPR (termasuk BPIW) melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-110, di depan Gedung Utama, Senin (21/5). Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini bertemakan "Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital." Berikut dokumentasi kegiatan tersebut.

PAMERAN INDOBUILD- TECH 2018



Pegawai Kementerian PUPR saat memberikan informasi saat dimintai pengunjung pameran.



Para pengunjung booth Kementerian PUPR mengisi daftar hadir.



Panel BPIW mengenai produk dan pembangunan dari Kementerian PUPR.



Para mahasiswa menyimak talk show mengenai proses pembangunan jembatan di booth Kementerian PUPR.



Booth Kementerian PUPR selalu dibanjiri para pengunjung

Dalam rangka menyebarkan informasi produk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sub Bagian Layanan Informasi BPIW dalam koordinasi Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, turut serta dalam pameran Indobuildtech di ICE BSD yang berlangsung pada (2-6/5) lalu.

Dalam pameran yang mengangkat tema "The Trade Show for Road Construction and Highway Development" tersebut, BPIW menampilkan panel pembangunan *Integrated Rest Area* Rambutan Siwi di Kabupaten Jembrana, Bali. Pameran Indobuildtech merupakan event yang digelar para *stakeholder urban development* seperti *kontraktor, developer, manufacturer, project planner*, dan juga pemerintah.

Obras

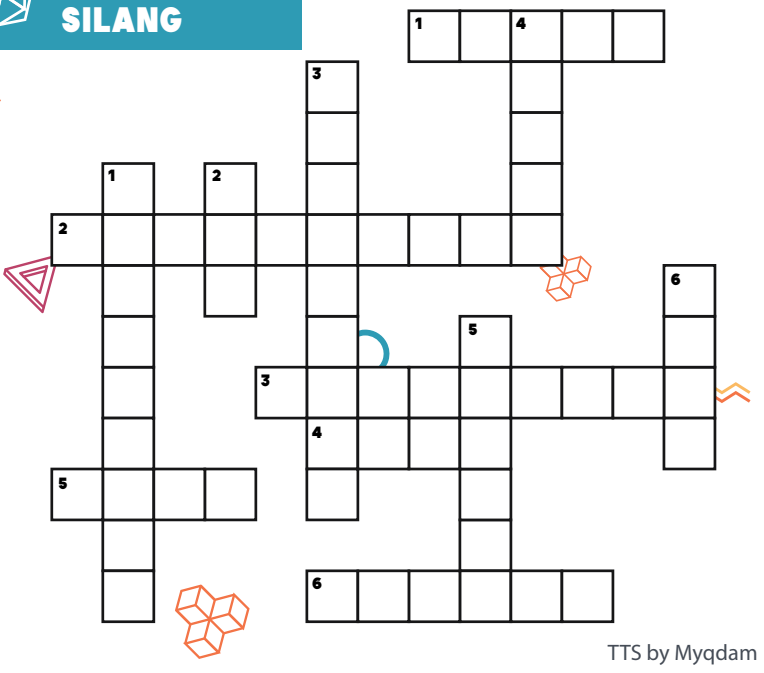
Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI





TEKA-TEKI SILANG



TTS by Myqdam

Mendatar

1. Rumah Khusus
2. Anjungan Cerdas di Pulau Bali
3. Salah satu metropolitan di Indonesia
4. Master Plan Development Plan
5. Salah satu pos lintas batas negara
6. Sungai bermuara di Samudera Hindia

Menurun

1. Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3. Jembatan di atas teluk Youtefa
4. Ibukota Kabupaten Pidie
5. Makanan khas terbuat dari sagu
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah

KETENTUAN

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : humasbpiw@pu.go.id dengan mengirim foto/scan jawaban. Jawaban juga dapat disampaikan melalui **WhatsApp No: 0812-9897-4748** disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 30, Juni 2018.

JAWABAN KUIS EDISI 28

1. Sebutkan 3 Kawasan pariwisata yang menjadi target *Integrated Tourism Masterplan* BPIW !
Jawaban : Mandalika, Danau Toba dan Borobudur
2. Apa kepanjangan dari KSPN ?
Jawaban : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
3. Sebutkan 3 kawasan perbatasan yang MPDP nya sedang disusun BPIW !
Jawaban :
 - a. Kawasan perbatasan negara Skouw, Kota Jayapura
 - b. Kawasan perbatasan negara Motamasin, Kab. Malaka
 - c. Kawasan perbatasan negara Wini, NTT

PEMENANG KUIS EDISI 28

1. **Brillyanda Wicaksono Aji**
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. **R.P. Ach. Rahman Dwi Cahyo Adi**
Gedung Utama Menteri Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR



Ir. I Gde Wayan Samsi G., M.Appl.Sc

Mendorong Tim Agar Piawai Berkomunikasi, Sigap dan Lincah

Pengadaan tanah merupakan hal yang strategis dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur. Pasalnya, apabila pengadaan tanah bermasalah dapat menghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam pengembangan infrastruktur juga selalu membutuhkan lahan tanah untuk pembangunannya.

“Untuk itu, orang-orang yang mengurusnya (pengadaan tanah,-red) harus benar-benar siap, mulai mampu berkomunikasi yang baik, sigap, lincah serta kalau muncul permasalahan dapat bergerak cepat mengkomunikasikan dengan tim untuk membantu menyelesaikan permasalahannya,” ungkap Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ir. I Gde Wayan Samsi G., M.Appl.Sc saat ditemui “Sinergi” di ruangan kerjanya, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, sarjana Teknik Lingkungan jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, senantiasa mendorong jajarannya di Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk senantiasa mengembangkan kapasitas diri, kemampuan berkomunikasi, melatih kesiapan dan kelincahan dalam mencari solusi.

Selain dari faktor internal tim, penerima penghargaan Satya Lencana Bakti Sosial dari Presiden RI ini berharap informasi dari bidang dan unit organisasi (Unor) lain apabila ada permasalahan dalam pengadaan tanah. “Hadirnya informasi dari yang lain, kerap kali membantu dalam mempercepat penemuan formulasi solusi,” terangnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Korps Menwa ITB 2018-2021 itu optimis, bahwa pengadaan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum, akan semakin mendapat kemudahan. Terlebih, Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sudah ditunjang dengan berbagai aturan di bawahnya, seperti Peraturan Presiden (Perpes) dan perangkat paket-paket ekonomi yang digulirkan pemerintah.

“Selain itu, adanya komitmen kuat dari lembaga terkait yang bersentuhan dengan pengadaan tanah, seperti Badan Pertanahan Negara (BPN), pemerintah daerah dan pihak lain,” terang Samsi. (**ris/infoBPIW**)



I Gde Wayan Samsi G saat melakukan peninjauan di lapangan

Sumber: Istimewa

Inovasi untuk Kemudahan Pengadaan Tanah

Pria yang juga mengemban amanah sebagai Koordinator Bidang Kerjasama Riset Dalam Negeri, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) ini juga menyatakan untuk mempermudah pengadaan tanah untuk infrastruktur PUPR, pihaknya sudah menginisiasi dan membangun sistem teknologi informasi komunikasi (TIK) berupa aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (Simonah).

“Simonah dibangun sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif serta tepat waktu,” terang suami Ny. Monika Raharti ini.

Hadirnya Simonah, lanjutnya, informasi mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR bisa semakin tertib, tidak tumpang tindih, serta dapat diakses dan dipantau pihak berkepentingan kapan saja dan dimana saja.

Ia berharap, Simonah dapat membuat penyajian data pengadaan tanah yang komprehensif dan tertib terwujud. Sehingga, formulasi solusi pengadaan tanah semakin

mudah dilaksanakan. “Saat ini posisi Simonah *stanby* (siap sedia,-red) untuk beroperasi, menunggu prosedural legalnya. Sambil menunggu syarat legalnya itu, kami juga melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan fitur,” ungkap Samsi.

Di sisi lain dari pekerjaan, Samsi setiap akhir pekan senantiasa menargetkan kumpul dengan anak dan istri. “Saat hari kerja, saya posisi terpisah dari anak dan istri. Saya di Jakarta, istri dan anak-anak di Bandung, sehingga saat libur akhir pekan selalu dimanfaatkan untuk kumpul keluarga,” ujar ayah dari Gde Paksi Raganata, Luh Made Arini Candraputri dan Luh Nyoman Trijati Krisnawardani ini.

Dengan begitu setiap akhir pekan, dirinya dapat menjalin hubungan yang tetap hangat, baik dan erat. “Selain itu, kita juga sering nonton bioskop dan nonton konser bersama-sama,” terang Samsi mengisahkan.

Saat hari libur datang, Samsi juga sering membawa jalan-jalan hewan peliharaan kesayangannya ke sejumlah tempat, mulai taman atau sekedar keliling di kompleks perumahannya. ([ris/infoBPIW](#))

Sege nap Pimpinan dan Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengucapkan:

Selamat
Idul Fitri

1 Syawal 1439 H
Taqobalallahu Minnaa wa Minkum Minal'Aidin wal Faizin



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR

